

LAPORAN KINERJA

BIRO UMUM BADAN PUSAT STATISTIK



LAPORAN KINERJA

BIRO UMUM
BADAN PUSAT STATISTIK

2025



romum@bps.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 merupakan laporan sekaligus pertanggungjawaban yang dibuat secara tahunan untuk merangkum seluruh kegiatan Biro Umum. Laporan ini mencakup akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan anggaran Biro Umum untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga perkantoran; inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN); layanan pengadaan barang dan jasa; serta pengelolaan pencetakan, kearsipan dan ekspedisi.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan untuk memberikan gambaran umum, analisis, dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025, perkembangan capaian kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya, serta kinerja dalam pengelolaan anggarannya. Laporan ini disajikan dalam bentuk narasi ringkas dengan lampiran pendukung dalam bentuk gambar dan tabel-tabel.

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan laporan ini. Kami mengharapkan juga kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan kinerja Biro Umum di masa mendatang.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Biro Umum



Martin Wibisono

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Biro Umum	2
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	4
1.4 Potensi Dan Permasalahan	6
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi dan Misi BPS.....	10
2.2 Target Kinerja Biro Umum 2025-2029.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025	12
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	13
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Umum Tahun 2025	16
3.2 Capaian Kinerja Biro Umum Terhadap Target Renstra.....	31
3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	33
3.4 Prestasi dan Inovasi Biro Umum Tahun 2025.....	34
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	40
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Rekomendasi perbaikan kinerja.....	43
LAMPIRAN	44

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian IKU Biro Umum Tahun 2025	vii
Tabel 2. Alokasi Anggaran Total Biro Umum Tahun 2025	5
Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Biro Umum Tahun 2025-2029	12
Tabel 4. Target Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025	12
Tabel 5. Perubahan Alokasi Anggaran Total Biro Umum Tahun 2025	15
Tabel 6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025	17
Tabel 7. Perhitungan PKO Biro Umum Tahun 2025.....	18
Tabel 8. Capaian Kinerja Biro Umum Menurut Sasaran Tahun 2023-2025	21
Tabel 9. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Arsip (IPA) Tahun 2025.....	22
Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025.....	25
Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025	28
Tabel 12. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum Tahun 2025	31
Tabel 13. Capaian Kinerja Biro Umum Terhadap Target Renstra.....	32
Tabel 14. Nilai Efisiensi per Sasaran Kegiatan Tahun 2025	40

Daftar Gambar

Gambar 1.	Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025	vii
Gambar 2.	Struktur Organisasi Biro Umum	3
Gambar 3.	Persentase Pegawai Biro Umum Menurut Pendidikan	4
Gambar 4.	Persentase Pegawai Biro Umum Menurut Golongan	5
Gambar 5.	Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2023-2025	16
Gambar 6.	Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum dan Rata-Rata Kesestamaan Tahun 2025	19
Gambar 7.	Penyerahan Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip oleh ANRI	35
Gambar 8.	Piagam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dari ANRI	36
Gambar 9.	Piagam Penghargaan P3DN Tahun 2025 dari Kementerian Perindustrian	36
Gambar 10.	Piagam Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 dari DJKN.	37
Gambar 11.	Tampilan Aplikasi CERMAT (CEpat, Responsif, dan Maksimal Tindak Lanjut).....	38
Gambar 12.	Tampilan Sistem Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Terpadu (Simandaru) pada BackOffice.....	39

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Awal)	45
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 1)	47
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 2)	49
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 3)	51
Lampiran 5.	Jumlah Pegawai Biro Umum Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2025	53
Lampiran 6.	Jumlah Pegawai Biro Umum Menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan Tahun 2025	54
Lampiran 7.	Surat Hasil Penilaian Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025	55
Lampiran 8.	Surat Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025	62
Lampiran 9.	Surat Hasil Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025	71
Lampiran 10.	Diseminasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Biro Umum Tahun 2025 ...	74
Lampiran 11.	Daftar Prestasi/Penghargaan yang Diraih Biro Umum Tahun 2025	80
Lampiran 12.	Daftar Inovasi yang Dihasilkan Biro Umum Tahun 2025	81
Lampiran 13.	Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025	82



Ringkasan Eksekutif

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah lingkup Sekretariat Utama, Biro Umum memiliki tugas yaitu melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, pengadaan barang/jasa, pencetakan, arsip dan ekspedisi. Ini menunjukkan bahwa tugas Biro Umum memberikan dukungan bagi kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan statistik, melalui pemberian layanan Barang Milik Negara (BMN), Layanan Umum (Layanan Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan; Layanan Kerumahtanggaan; Layanan Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi; Layanan Pengadaan Barang/Jasa), Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor), dan layanan penyediaan sarana dan prasarana internal.

Dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang tertuang dalam Renstra BPS 2025-2029, Biro Umum memberikan kontribusi melalui tercapainya sasaran kegiatan “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN” yang mendukung tercapainya sasaran Program “Terwujudnya “Belanja Berkualitas” melalui Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal” dan mendukung tercapainya sasaran strategis BPS yaitu “Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, akuntabel, dan profesional”.

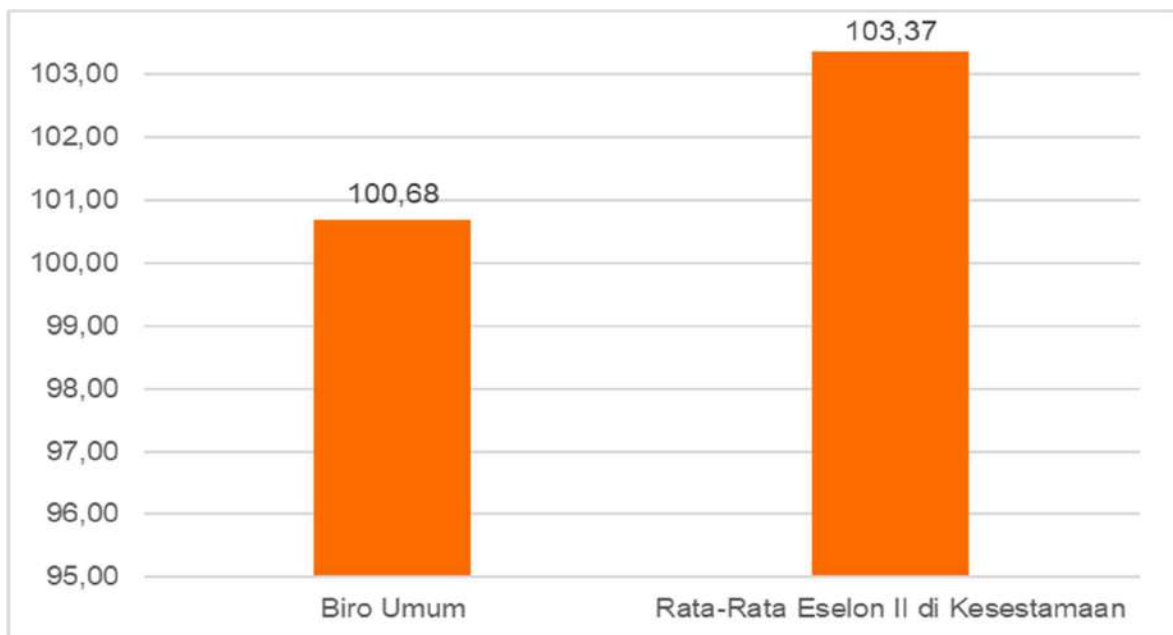
Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, tahun 2025 Biro Umum memperoleh alokasi anggaran (dapat dipergunakan) yang berasal dari APBN pada Program “Dukungan Manajemen BPS Lainnya” dan Kegiatan “Dukungan Manajemen BPS Lainnya” sebesar Rp129.655.907.000,-. Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran Biro Umum mencapai Rp119.404.930.629,- atau sebesar 92,09 persen dari total anggaran yang dapat dipergunakan dengan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada layanan perkantoran (EBA.994).

Sedangkan untuk pencapaian kinerja dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum tahun 2025 menunjukkan tingkat keberhasilan dengan capaian sebesar 100,68 persen. Apabila dilihat berdasarkan capaian 4 (empat) indikator yang menjadi tanggung jawab Biro Umum, masih terdapat indikator yang capaiannya sedikit belum mencapai target yaitu indikator Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum dengan capaian sebesar 99,94 persen. Walaupun demikian, Biro Umum berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kepuasan layanan yang diberikan di tahun 2026 ini.

Tabel 1. Capaian IKU Biro Umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,66	3,68	100,55
2.	Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)	89,60	90,07	100,52
3.	Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00	96,61	101,69
4.	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00	87,95	99,94
Rata-Rata Capaian IKU (%)				100,68

Sedangkan apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja unit kerja eselon II di lingkup Kesestamaan yang sebesar 103,37 persen, capaian kinerja Biro Umum sebesar 100,68 persen memang lebih rendah. Walaupun demikian, hampir seluruh indikator kinerja utama Biro Umum telah berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan sinergi yang kuat baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Biro Umum untuk mencapai kinerja yang terbaik.



Gambar 1. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Pencapaian kinerja Biro Umum pada tahun 2025 juga diiringi oleh tingkat efisiensi yang berhasil dicapai sebesar **1,09** persen. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Umum dinilai “efisien” dikarenakan dengan penyerapan anggaran yang sebesar 92,09 persen, mampu mencapai kinerja bahkan melebihi dari target yang diperjanjikan di awal tahun 2025.

Keberhasilan Biro Umum dalam pencapaian target kinerja yang sudah diperjanjikan di awal tahun dengan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang efisien menunjukkan bahwa Biro Umum telah berkontribusi secara nyata dalam mendukung tercapainya sasaran program yaitu Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal dan juga mendukung tercapainya sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian Biro Umum telah berkontribusi dalam tercapainya visi dan misi BPS sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SAKIP dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Melalui SAKIP, instansi pemerintah didorong untuk fokus pada pencapaian hasil (*outcome*) dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pada penyerapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan semata. Dengan demikian, SAKIP membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, SAKIP berperan penting dalam memperkuat budaya kinerja di lingkungan birokrasi. SAKIP mendorong pimpinan dan seluruh pegawai untuk memiliki target kinerja yang jelas, indikator yang terukur, serta evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan kinerja, sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur. Pada akhirnya, penerapan SAKIP yang baik akan meningkatkan akuntabilitas publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berintegritas, dan berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan SAKIP, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu

tahun anggaran. LAKIN merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Penyusunan LAKIN bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja instansi, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya. Selain itu, LAKIN juga menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui identifikasi permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut.

Penyusunan LAKIN Biro Umum tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik dikarenakan memuat informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Selain itu, LAKIN Biro Umum Tahun 2025 disusun sebagai sarana evaluasi internal untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan area yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Biro Umum pada periode berikutnya.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Biro Umum

Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi Biro Umum berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Utama dan Kepala BPS. Adapun tugas dan fungsi, serta susunan organisasi Biro Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tugas

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga; inventarisasi, penyimpanan dan penghapusan barang milik negara; pengadaan barang/jasa; serta pencetakan, arsip, dan ekspedisi.

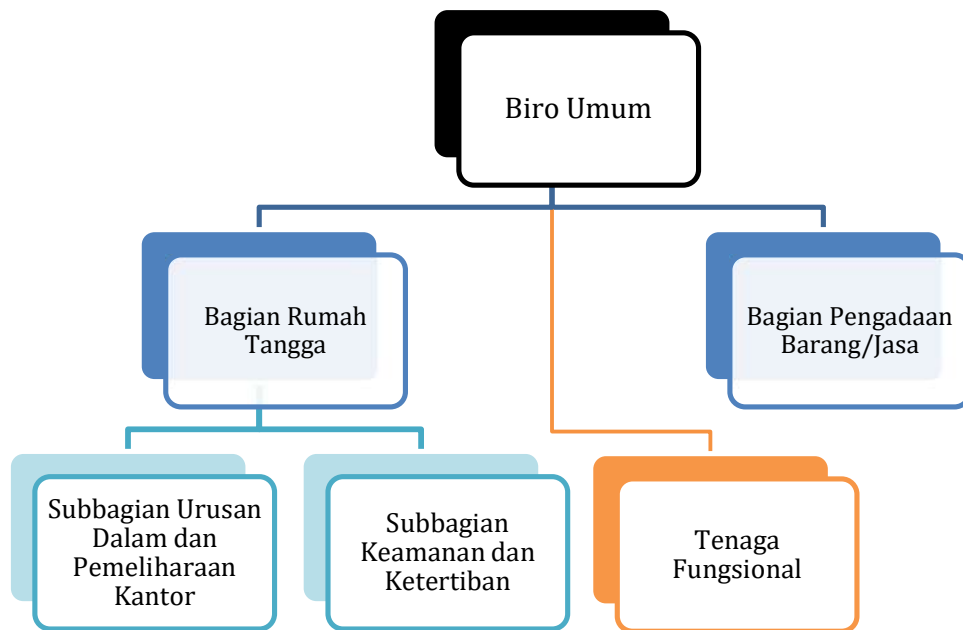
B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga perkantoran;
- b. Pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan dan penghapusan BMN;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; serta
- d. Pelaksanaan pencetakan, kearsipan, dan ekspedisi.

C. Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum terdiri dari 2 bagian dan kelompok jabatan fungsional, yakni: Bagian Rumah Tangga (RUTA), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); serta tenaga fungsional yang berada di Fungsi Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan (IPP); dan Fungsi Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi (PAE).



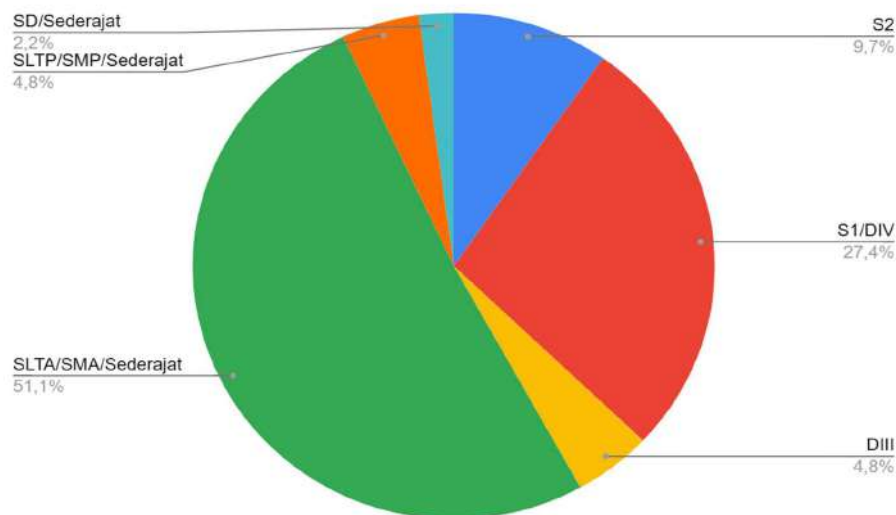
Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Umum

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

A. Dukungan Sumber Daya Manusia

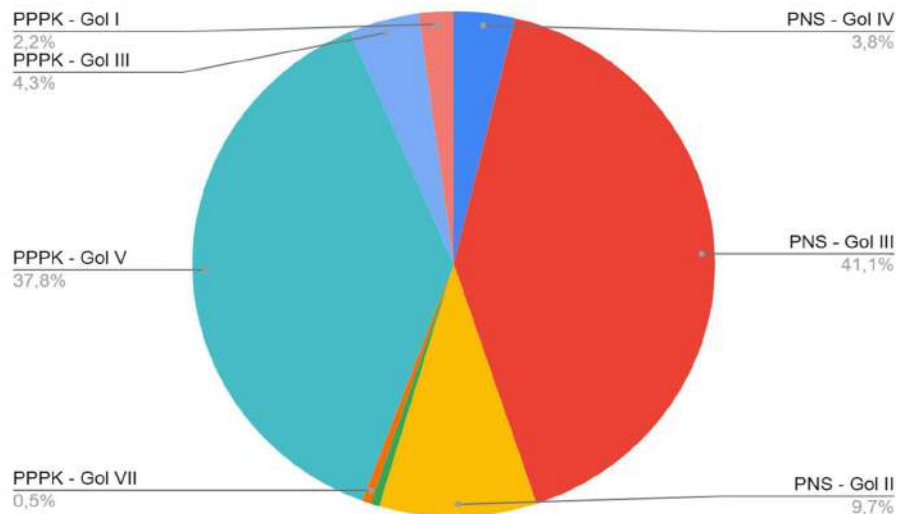
Biro Umum merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Utama yang dipimpin oleh Kepala Biro. Biro Umum dengan tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga; inventarisasi, penyimpanan dan penghapusan barang milik negara; pengadaan barang/jasa; serta pencetakan, arsip, dan ekspedisi harus memiliki sumber daya manusia yang handal. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM), baik secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan faktor utama untuk dapat mengemban tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel di Biro Umum. Di era perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, menuntut adanya kompetensi pegawai yang lebih tinggi, profesional, dan adaptif.

Adapun jumlah pegawai Biro Umum tahun 2025 sebanyak 186 orang. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan, sebagian besar pegawai Biro Umum memiliki pendidikan SLTA/SMA/Sederajat yaitu sebesar 51,1% atau sebanyak 95 pegawai dikarenakan adanya pegawai dengan status PPPK yang mendominasi di tingkat pendidikan ini.



Gambar 3. Persentase Pegawai Biro Umum Menurut Pendidikan

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai Biro Umum memiliki golongan III untuk PNS dan Golongan V untuk PPPK dengan masing-masing persentase sebesar 41,1% (76 pegawai) dan sebesar 37,8% (70 pegawai).



Gambar 4. Persentase Pegawai Biro Umum Menurut Golongan

B. Dukungan Anggaran

Biro Umum melaksanakan satu Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) pada kegiatan Dukungan Manajemen BPS Lainnya (2885). Tahun 2025, Biro Umum memperoleh alokasi anggaran total untuk kegiatan 2885 sebesar Rp138.015.864.000,- dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Total Biro Umum Tahun 2025

No.	Uraian POK	Nilai Total Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)
2885.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		134.436.154.000
1	EBA.956 Layanan BMN	137.300.000
2	EBA.962 Layanan Umum	1.941.410.000
3	EBA.994 Layanan Perkantoran	132.357.444.000
2885.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		3.579.710.000
4	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.842.613.000
5	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	737.097.000
	Jumlah	138.015.864.000

1.4 Potensi Dan Permasalahan

A. Potensi Yang Dimiliki

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah lingkup Sekretariat Utama, Biro Umum memiliki tugas yaitu melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, pengadaan barang/jasa, pencetakan, arsip dan ekspedisi. Ini menunjukkan bahwa tugas Biro Umum memberikan dukungan bagi kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan statistik, melalui pemberian layanan Barang Milik Negara (BMN), Layanan Umum (Layanan Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan; Layanan Kerumahtanggaan; Layanan Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi; Layanan Pengadaan Barang/Jasa), Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor), dan layanan penyediaan sarana dan prasarana internal.

Begitu strategisnya peran Biro Umum dapat terlihat dari peran fungsi Pencetakan, Arsip dan Ekspedisi (PAE) dalam menunjang kelancaran dalam pencapaian tugas dan fungsi Biro Umum dalam rangka mewujudkan tujuan BPS, dan peran fungsi Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan (IPP) yang menghasilkan output dari pengelolaan BMN seperti Laporan Barang Pengguna (LBP), dimana LBP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas keuangan secara kelembagaan.

Peran Biro Umum yang strategis juga dapat terlihat dari peran Bagian Rumah Tangga yang menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang layak serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administrasi di BPS. Selain itu, Bagian Rumah Tangga juga menjamin terwujudnya kebersihan, keamanan dan ketertiban di Badan Pusat Statistik. Tersedianya dukungan logistik dan fasilitas menjadi modal kuat untuk memberikan dan terus meningkatkan layanan rumah tangga di BPS dalam memperlancar operasional seluruh unit kerja di BPS. Sedangkan peran Bagian Pengadaan Barang dan jasa yaitu menjamin terselenggaranya dukungan Pengadaan barang/jasa untuk kelancaran kegiatan teknis dan administrasi di BPS, antara lain melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan barang/jasa, melaksanakan pendampingan, memberikan konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan barang/jasa bagi pelaku

pengadaan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan mendorong terwujudnya akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Untuk dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik, tentunya Biro Umum didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan terlatih. Pegawai yang menjalankan fungsi IPP memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengelola BMN dikarenakan memiliki sertifikasi kompetensi pengelolaan BMN untuk tingkat Kementerian Lembaga. Sebagian SDM yang mengelola fungsi PAE juga telah mendapat pelatihan dan/atau bimtek sesuai tugas masing-masing sehingga mempunyai kompetensi/kemampuan yang dapat diandalkan. Begitupun untuk pegawai di Bagian Rumah Tangga umumnya memiliki pengalaman dalam pengelolaan fasilitas dan logistik kantor. Sedangkan pegawai di Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengelola pengadaan barang/jasa dikarenakan memiliki sertifikasi PBJ minimal dasar/level 1 dan menjabat sebagai fungsional ahli pengadaan barang/jasa.

Sejak tahun 2024, pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Umum memiliki komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Hal ini tercermin dari terselenggaranya Survei Kepuasan Biro Umum, yang berarti bahwa Biro Umum siap untuk dinilai oleh pihak eksternal Biro Umum atas kepuasan layanan yang telah diberikan. Hasil evaluasi juga dapat menjadi masukan bagi jajaran di lingkungan Biro Umum untuk terus membangun komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan, Biro Umum telah memanfaatkan penggunaan teknologi dengan membangun beberapa aplikasi sederhana, seperti portal Pengadaan BPS yang mengelola layanan permintaan terkait Pengadaan barang/jasa (pemilihan penyedia melalui pokja pemilihan/pejabat Pengadaan, permintaan akun LPSE, dll); Dashboard Rumah Tangga yang salah satunya mengelola permintaan layanan rumah tangga seperti layanan peminjaman kendaraan dinas, dll; Sistem Monitoring dan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (SIMPEL PSP) yang mengelola permohonan PSP BMN; Alat bantu perhitungan Sewa Rumah Negara LBP Tingkat K/L yang membantu satker untuk menghitung tarif sewa rumah negara; dan portal pengajuan izin penghunian Rumah Negara.

Selain itu, penggunaan mesin pencetakan digital yang memadai dari sisi kapasitas dan sumber dayanya serta penggunaan peralatan dan perlengkapan yang memadai dalam proses pengepakan menjadi modal kuat Biro Umum untuk memberikan pelayanan yang optimal.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima, akuntabel, dan transparan lebih banyak disebabkan pada permasalahan yang bersifat internal. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya kompetensi dan keterampilan beberapa formasi fungsional yang ada di Biro Umum sesuai dengan bidangnya.
2. Belum optimalnya ketersediaan jenjang jabatan dan formasi JF di Biro Umum, khususnya untuk fungsional pengelolaan BMN.
3. Keterbatasan fasilitas pendukung layanan, seperti peralatan mesin cetak yang belum dapat memenuhi kebutuhan dan ruang *record center* yang belum memenuhi standar kearsipan;
4. Tertundanya penggantian *spare part* Lift Gedung 2 yang menyebabkan keterbatasan mobilitas pegawai; dan
5. Belum adanya sistem teknologi yang terintegrasi untuk seluruh pelayanan yang diberikan (digitalisasi layanan Biro Umum).

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 terbagi ke dalam 4 bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang; Kedudukan, Tugas Fungsi, dan Susunan Organisasi Biro Umum; Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran; Potensi dan Permasalahan Biro Umum; dan Sistematika Penyajian Laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; target kinerja pada Rencana Strategis Biro Umum 2025-2029; Perjanjian Kinerja Biro Umum tahun 2025; dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Analisis Capaian Kinerja dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Umum tahun 2025, termasuk perbandingan capaian kinerja selama tahun 2023-2025, perbandingan capaian kinerja terhadap rata-rata unit kerja di lingkup Sekretariat Utama, dan capaian kinerja per sasaran; Capaian Kinerja terhadap target Renstra; Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional; Prestasi dan Inovasi Biro Umum Tahun 2025; serta Realisasi dan Efisiensi Anggaran yang dilakukan oleh Biro Umum tahun 2025.

Bab IV. Penutup berisi tentang beberapa kesimpulan yang sudah dirumuskan dan berbagai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Umum di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi BPS

Untuk periode 2025-2029, BPS merumuskan visi dan misi dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan yang ada dan selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas. Adapun visi dan misi BPS yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Visi : “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi :

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, BPS telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Sedangkan BPS menetapkan sasaran strategis yang digunakan sebagai tolak ukur untuk pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu.
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Biro Umum, yang merupakan bagian dari Sekretariat Utama, dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan tentunya harus mendukung visi, misi dan tujuan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik dan selaras serta mendukung visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistik selaku lembaga. Perumusan visi Biro Umum untuk periode 2025-2029 perlu memperhatikan isu-isu strategis Biro Umum yang akan mempengaruhi peran dan kinerja Biro Umum dalam memberikan pelayanan demi kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja/satker di lingkungan BPS. Namun, hingga LAKIN ini disusun, visi, misi, dan tujuan di level unit kerja/satuan kerja termasuk Biro Umum belum ditetapkan.

2.2 Target Kinerja Biro Umum 2025-2029

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja, Biro Umum menetapkan sasaran kegiatan yaitu **terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN**. Adapun sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Sekretariat Utama BPS yaitu Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, yang pada akhirnya mendukung sasaran strategis BPS yaitu Terwujudnya "Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, akuntabel, dan profesional".

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan 2025-2029, Biro Umum menetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)** dan target selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Biro Umum Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,66	3,68	3,70	3,72	3,74
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,60	90,00	90,50	91,00	91,50
	Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00

2.3 Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Biro Umum menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 163 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. IKU Biro Umum yang telah ditetapkan ini menjadi dasar perencanaan kinerja di Biro Umum, utamanya berupa dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Sekretaris Utama sebagai atasan langsungnya. Adapun perjanjian kinerja Biro Umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target PK 2025
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,66
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,60
	Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00
	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00

Realisasi dari target perjanjian kinerja dimonitoring rutin setiap triwulanan yang dicantumkan dalam Form Rencana Aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai bahan penyusunan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, seluruh upaya dalam pencapaian target kinerja menjadi lebih terkoordinir, terkendali, dan fokus.

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan **Prioritas Nasional, Prioritas Presiden**, dan penanganan **Isu Strategis Nasional** Tahun 2025, BPS memiliki peran strategis yaitu penyedia data statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pemantauan, serta evaluasi capaian pembangunan nasional.

Peran Badan Pusat Statistik dalam mendukung **Prioritas Nasional** mencakup pembinaan statistik sektoral yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; publikasi/laporan penyusunan inflasi; dan pemanfaatan big data untuk statistik resmi yang tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata. Dukungan BPS terhadap **Prioritas Presiden** mencakup pelaksanaan DTSEN sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; pelaksanaan Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi sebagai amanat Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah; penghitungan kemiskinan ekstrem sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG untuk mengukur dampak program MBG secara komprehensif. Sedangkan dukungan BPS terhadap penanganan **Isu Strategis Nasional** mencakup pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani (menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani/IKP), yang merupakan mandat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS; pelaksanaan Sensus Ekonomi yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan penyediaan data komoditas pangan strategis (gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, bawang putih) sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional, yang merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Adapun peran biro Umum dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan penanganan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 tersebut yaitu sebagai unit kerja pendukung yang memastikan tersedianya dukungan sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas presiden dan isu strategis nasional, meliputi dukungan layanan sarana dan prasarana, dukungan layanan pengadaan barang dan jasa, dukungan layanan pencetakan laporan dan bahan untuk pimpinan, serta dukungan layanan pengiriman.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Tahun 2025 Biro Umum memperoleh alokasi anggaran total (DIPA awal) pada kegiatan Dukungan Manajemen BPS Lainnya (2885) yaitu sebesar Rp127.651.245.000,-. Namun alokasi anggaran total Biro Umum tersebut mengalami revisi anggaran sehingga alokasi anggaran total (revisi DIPA terakhir) menjadi Rp138.015.864.000,- dengan rincian alokasi anggaran untuk Komponen Rincian Output (KRO) Layanan Dukungan Manajemen Internal (2885.EBA) yaitu Rp134.436.154.000,- dan alokasi anggaran untuk KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2885.EBB) yaitu Rp3.579.710.000,-. Perubahan alokasi anggaran Biro Umum tahun 2025 berdasarkan Rincian Output (RO) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Alokasi Anggaran Total Biro Umum Tahun 2025

No.	Uraian POK	Nilai Total Pagu Awal (Rp)	Nilai Total Pagu Revisi Terakhir (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2885.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		122.002.506.000	134.436.154.000
1	EBA.956 Layanan BMN	132.113.000	137.300.000
2	EBA.962 Layanan Umum	3.822.170.000	1.941.410.000
3	EBA.994 Layanan Perkantoran	118.048.223.000	132.357.444.000
2885.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		5.648.739.0000	3.579.710.000
4	EBB.951 Layanan Sarana Internal	403.000.000	2.842.613.000
5	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	5.245.739.000	737.097.000
Jumlah		127.651.245.000	138.015.864.000

Dari total pagu anggaran Biro Umum berdasarkan revisi DPA terakhir, jumlah pagu anggaran yang **dapat digunakan** yaitu hanya sebesar Rp129.655.907.000,- atau sebesar 93,94 dari anggaran total Biro Umum pada Dukungan Manajemen BPS Lainnya (2885).

BAB III

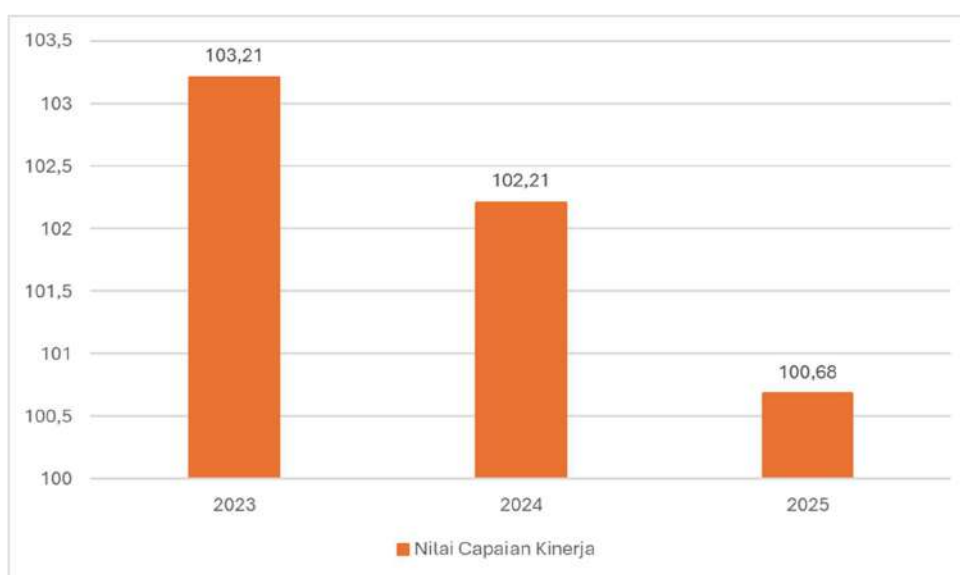
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Umum merupakan kewajiban Biro Umum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran selama satu tahun yang telah ditetapkan melalui perencanaan kinerja secara transparan, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Biro Umum tahun 2025 secara komprehensif telah ditetapkan indikator-indikator guna menggambarkan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangannya.

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Umum Tahun 2025

a. Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2023-2025

Secara rata-rata, capaian kinerja Biro Umum Tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian yaitu sebesar 100,68 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,53 persen dibandingkan capaian tahun 2024. Capaian kinerja Biro Umum selama tahun 2023-2025 cenderung mengalami penurunan, meskipun capaian masih diatas 100 persen. Capaian kinerja Biro Umum tahun 2023 sebesar 103,21 persen, kemudian turun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 102,21 persen, dan turun kembali di tahun 2025 dengan capaian sebesar 100,68 persen.



Gambar 5. Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2023-2025

Pada tahun 2025, indikator kinerja “Tingkat Digitalisasi Arsip” memperoleh nilai capaian tertinggi dengan capaian 101,69 persen atau memperoleh realisasi 96,61 poin dari target 95,00 poin. Sedangkan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum” memperoleh nilai capaian terendah dengan capaian 99,94 persen atau memperoleh realisasi 87,95 persen dari target 88,00 persen. Capaian kinerja Biro Umum tahun 2025 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Poin	3,66	3,68	100,55
2	Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)	Poin	89,60	90,07	100,52
3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	95,00	96,61	101,69
4	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	Persen	88,00	87,95	99,94
Capaian Kinerja					100,68

Catatan: Realisasi IPA masih mengacu pada Hasil Perhitungan sementara IPA Tahun 2025 melalui terbitnya Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-7/KN.KN.2/2026 Tanggal 15 Januari 2026

b. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Biro Umum Tahun 2025

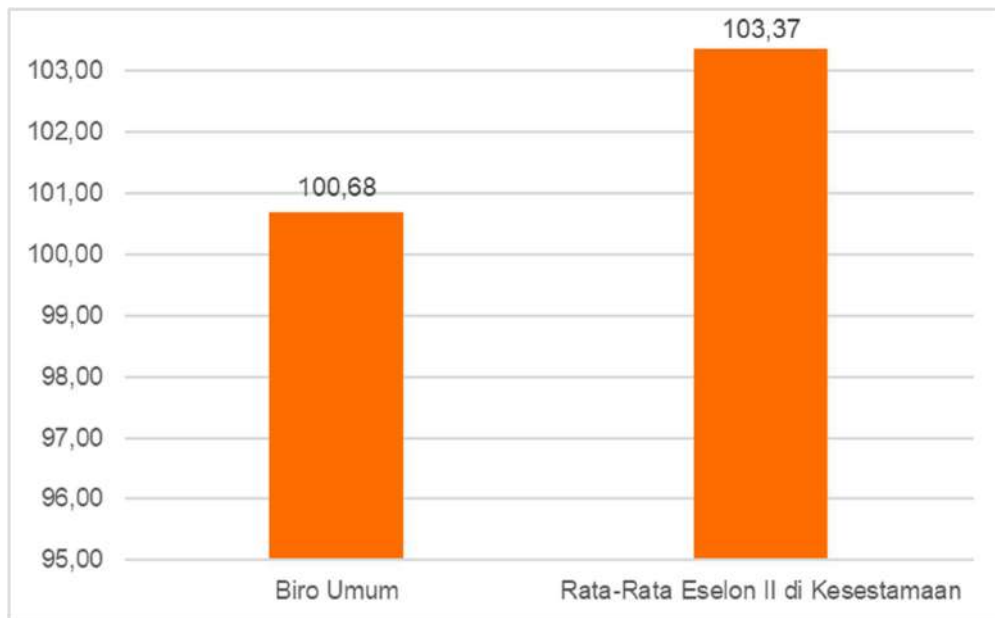
Selama periode satu tahun pelaksanaan kinerja yaitu tahun 2025, Biro Umum menunjukkan capaian kinerja yang baik. Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), diperoleh total nilai sebesar 362 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) rata-rata capaian PK sebesar **90,61**. Atas capaian tersebut, Biro Umum memperoleh predikat PKO **Baik** yang mencerminkan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Biro Umum sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Berikut perhitungan PKO Biro Umum tahun 2025 dengan nilai SAKIP Biro Umum tahun 2025 sebesar 70,20:

Tabel 7. Perhitungan PKO Biro Umum Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,66	3,68	100,55	100,55	10%	90,49
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,60	90,07	100,52	100,52	10%	90,47
	Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00	96,61	101,69	101,69	10%	91,53
	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00	87,95	99,94	99,94	10%	89,95
Total Capaian PK							362
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK							90,61
Predikat PKO							BAIK

c. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum terhadap Rata-Rata Kinerja Eselon II Kesestamaan Tahun 2025

Capaian kinerja Biro Umum tahun 2025 sebesar 100,68 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata unit kerja eselon II Kesestamaan yang sebesar 103,37 persen. Rendahnya capaian kinerja Biro Umum terutama terlihat dari indikator yang memiliki kinerja di bawah 100 persen yaitu indikator “Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum” yang capaiannya sebesar 99,94 persen.



Gambar 6. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum dan Rata-Rata Kesestamaan Tahun 2025

Dari sisi persiapan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Biro Umum tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain persiapan survei yang minim di tengah rutinitas pekerjaan pokok setiap bagian, keterbatasan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan survei, serta rendahnya jumlah responden yang berpartisipasi meskipun telah dibuka periode perpanjangan pengisian. Dari sisi layanan, masih terdapat beberapa kelemahan dalam layanan yang diberikan oleh Biro Umum sehingga mempengaruhi persepsi pegawai dalam menilai kepuasan layanan yang diterimanya, sebagai contoh kebijakan terkait penghunian rumah negara yang belum terimplementasi dengan baik, keterbatasan jumlah unit rumah dinas yang tersedia yang belum bisa memenuhi permintaan penghunian, keterbatasan anggaran ATK dan *Computer Supplies* terutama terkait toner sehingga beberapa permintaan toner belum dapat dipenuhi dengan baik, serta layanan *Chatbot* Pelaporan terkait kerusakan dan kebersihan sarana dan prasarana kantor berbasis *QR Code* (CERMAT) baru terimplementasi pada gedung tertentu (belum seluruh gedung), sehingga respons untuk layanan kerusakan dan kebersihan belum dapat seluruhnya ditindaklanjuti dengan cepat.

Berdasarkan hasil tersebut, Biro Umum telah mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan yaitu:

1. Implementasi *Chatbot* Pelaporan Berbasis *QR Code* (CERMAT) yang direncanakan mulai digunakan secara efektif pada tahun 2026.
2. Peminjaman Kendaraan Dinas akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Backoffice yang sebelumnya menggunakan *link google form*, sehingga user dapat melakukan peminjaman kendaraan dinas melalui Backoffice seperti permintaan penggunaan ruang rapat.
3. Meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar kualitas dan kuantitas pelayanan bisa meningkat.
4. Mengevaluasi kebijakan internal pengelolaan BMN di lingkungan satker Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik.
5. Koordinasi dengan PPK dan PIC unit kerja (PJK) serta membuat matriks Rencana Pelaksanaan Paket Pengadaan agar Pejabat pengadaan/Pokja Pemilihan dapat memperoleh perkiraan kapan pengadaan akan dilaksanakan, sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi lebih baik.
6. Dibentuk Tim Konsultasi Pengadaan dan melakukan sosialisasi ke PPK terkait menu pengajuan konsultasi pengadaan melalui portal pengadaan.
7. Meningkatkan pelayanan pencetakan dan pengiriman dengan menerapkan manajemen cetak dan pengiriman serta memanfaatkan sarana dan prasarana, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan semakin baik dan cepat.
8. Meningkatkan kompetensi sumber daya kearsipan yang didukung dengan prasarana dan sarana kearsipan, sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi lebih baik.

d. Capaian Kinerja Menurut Sasaran Tahun 2023-2025

Biro Umum memiliki satu sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Tingkat pencapaian indikator kinerja Biro Umum tahun 2023-2025 per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Biro Umum Menurut Sasaran Tahun 2023-2025

Sasaran/ IKSS	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023***	2024***	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN								101,69	104,74	100,68
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Poin	N/A	N/A	3,66	3,32	3,66*	3,68	-	-	100,55
Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)	Poin	N/A	N/A	89,60	80,71	89,44	90,07	-	-	100,52
Tingkat Digitalisasi Arsip**	Poin	86,00	90,00	95,00	87,45	94,27	96,61	101,69	104,74	101,69
Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	Persen	N/A	N/A	88,00	N/A	87,04	87,95	-	-	99,94

Catatan:

* Terdapat perbedaan pencantuman nilai realisasi IPA tahun 2024 pada LAKIN Tahun 2024 (3,42) dengan Nilai IPA final tahun 2024 (3,66)

** Tingkat Digitalisasi Arsip untuk tahun 2023-2024 menggunakan nomenklatur Indeks Kearsipan.

*** Target tahun 2023 dan 2024 untuk IPA, ITKP, dan Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum belum tersedia karena belum ditetapkan sebagai IKU (tahun 2024 masih masuk dalam PK Suplemen)

**** Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum belum dilakukan di tahun 2023

Secara umum, capaian kinerja sasaran kegiatan Biro Umum memiliki tren yang berfluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun untuk tahun 2023 hanya berdasarkan dari tingkat digitalisasi arsip. Hal ini dikarenakan untuk IPA, ITKP dan Tingkat kepuasan Layanan Biro Umum belum masuk kedalam indikator kinerja PK di tahun 2023. Capaian kinerja sasaran kegiatan Biro Umum tahun 2024 yang sebesar 104,12 persen merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan perolehan tahun 2023 dan 2025. Namun demikian, tren fluktuatif tersebut terlihat juga pada capaian kinerja per indikator sasaran kegiatan.

e. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 per Indikator Kinerja Utama

Tahun 2025, capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Umum yaitu sebesar 90,09. Penjelasan lebih detail terkait capaian masing-masing Indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Umum sebagai berikut:

IKSK 1 : Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup 4 sasaran strategis yaitu Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif, dan Administrasi BMN yang andal. Tahun 2025 capaian kinerja Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 100,55 persen atau terealisasi sebesar 3,68 poin dari 3,66 poin yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Arsip (IPA) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IKSK 1. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Poin	3,66	3,68	100,55

Realisasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,68 poin didasarkan pada hasil Perhitungan sementara IPA Tahun 2025 melalui terbitnya Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-7/KN.KN.2/2026 Tanggal 15 Januari 2026.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja terkait Indeks Pengelolaan Aset (IPA) ini yaitu:

1. Tindak Lanjut BPK: secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru diterima pada akhir Triwulan III, namun informasi tentang isi LHP LKPP sudah disampaikan pada Triwulan III. Hal ini membuat perencanaan Tindak Lanjut menjadi mundur di Triwulan IV.
2. Pengelolaan PNBPN: belum terlaksana sepenuhnya kebijakan Akuntansi penggunaan akun PNBPN dari pengelolaan BMN, sehingga masih ditemui ketidakkonsistenan penggunaan akun antara estimasi dan realisasi.
3. Pengawasan dan Pengendalian: ditemukan ketidaksesuaian detail dana BMN antara data SIMAN dengan kondisi sebenarnya.

4. Asuransi BMN: ditemukan ketidaksesuaian daftar Asuransi BMN berdasarkan peraturan yang berlaku (Audit PDTT).
5. Pemindahtanganan BMN: menunda usulan SK Penghapusan.
6. Tindak Lanjut BMN Rusak Berat: satker yang belum memproses tindak lanjut BMN TDOP/RB berupa usulan penghapusan.
7. Sertifikasi Tanah Negara: satker belum update luas pada SAKTI sesuai sertifikat (K4) 4 Bidang (Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Papua, Kab. Mappi); masih terdapat tanah bermasalah 5 bidang (Prov. Sumbar, Kab. TanJab Barat, Kab. Ponorogo, Kab. Tolikara, Kab. Sarmi); penyelesaian Proses administrasi 14 bidang (Kab. Tolikara, Kab. Lubuk Linggau, Prov Jawa Timur, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tanah Datar, Kab. Bengkalis, Kab. Waikanan, Kab. Temanggung, Kab. Sangihe, Kab. Maluku Tengah (2), Kab. Buru, Kab. Peg. Bintang, Kab. Waropen); dan belum berproses 1 bidang (Kab. Mimika).
8. Penetapan Status Penggunaan: proses rewiu SK PSP di Tim Hukum Biro Humas dan Hukum s.d. SK ditandatangani relatif lama.

Dari kendala yang dihadapi tersebut, beberapa solusi telah dilakukan yaitu:

1. Tindak Lanjut BPK: mengidentifikasi daftar tanah pada LHP kemudian memverifikasi dengan data kondisi terakhir atas BMN yang masih perlu di TL akan direncanakan pada Triwulan IV.
2. Pengelolaan PNBPN: perbaikan penggunaan akun PNBPN yang berasal dari pengelolaan BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian: menginventarisir ketidaksesuaian data BMN tersebut.
4. Asuransi BMN: optimalisasi proses verifikasi data usulan.
5. Pemindahtanganan BMN: lelang ulang dan optimalisasi monitoring dan pengawasan.
6. Tindak Lanjut BMN Rusak Berat: optimalisasi monitoring dan pengawasan.
7. Sertifikasi Tanah Negara: mendorong agar 24 sisa Bidang tanah agar dioptimalkan progressnya sesuai target yang sudah ditetapkan.

8. Penetapan Status Penggunaan: koordinasi dengan tim hukum untuk percepatan proses finalisasi SK PSP; pembahasan pendelegasian wewenang penandatanganan SK pengelolaan BMN; dan percepatan regulasi pelimpahan wewenang pengelolaan BMN di lingkungan BPS.

Dari kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi perbaikan kinerja (rencana tindak lanjut) yang akan dilakukan di tahun 2026 ini yaitu:

1. Pengelolaan PNBPN: monitoring penggunaan akun PNBPN dan rekomendasi perbaikan melalui koreksi jurnal pelaporan BMN; dan penyesuaian timeline pelaporan tanpa merubah target akhir.
2. Pengawasan dan Pengendalian: menyampaikan temuan permasalahan kepada DJKN sebagai bahan perbaikan data SIMAN.
3. Asuransi BMN: usulan melalui RKBMN.
4. Pemindahtanganan BMN: mengajukan usulan Lelang Ulang dan melakukan monitoring dan pengawasan.
5. Tindak Lanjut BMN Rusak Berat: melakukan monitoring dan pengawasan.
6. Sertifikasi Tanah Negara: melakukan koordinasi dengan stakeholder memenuhi kelengkapan dokumen.
7. Penetapan Status Penggunaan: koordinasi dengan tim hukum untuk percepatan proses finalisasi SK PSP; pembahasan pendelegasian wewenang penandatanganan SK pengelolaan BMN; dan percepatan regulasi pelimpahan wewenang pengelolaan BMN di lingkungan BPS.

IKSK 2 : Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) adalah indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari sistem Pengadaan. Dalam penilaian ITKP, terdapat 3 (tiga) indikator yang dinilai yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
 - b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat)

- c. E-Purchasing
 - d. Non E-Tendering dan Non E-Purchasing
 - e. E-Kontrak
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)
 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
- Tahun 2025 capaian kinerja ITKP sebesar 100,52 persen atau terealisasi sebesar 90,07 poin dari 89,60 poin yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IKSK 2. Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)	Poin	89,60	90,07	100,52

Realisasi ITKP sebesar 90,07 poin didasarkan pada surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 1550/D.2.1/01/2026 Tanggal 21 Januari 2026 Hal: Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja terkait ITKP ini yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan:
 - a. Satker belum tertib dalam pemanfaatan sistem pengadaan termasuk pencatatan non tender secara berkala (pencatatan baru dilakukan menjelang akhir tahun anggaran berakhir);
 - b. Adanya Migrasi Layanan *INAPROC Service Bus* (ISB) ke *API Gateway INAPROC* dari LKPP yang akan berpengaruh ke akses data untuk pengolahan data monitoring pemanfaatan sistem dan pembangunan sistem pemantauan pengadaan barang/jasa (SIMANDARU) yang telah dibangun di Backoffice.

2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ: Keterbatasan kuota yang disediakan Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP untuk pelatihan perjenjangan JF Madya dan adanya efisiensi anggaran di LKPP sehingga pelatihan perjenjangan pertama yang sudah sempat dibuka pendaftarannya dilakukan penundaan pelaksanaannya.
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ):
 - a. Adanya pergantian tim di UKPBJ BPS yang menangani kematangan UKPBJ;
 - b. *Response* yang cukup lambat dari tim LKPP atas reuiu dokumen/bukti dukung yang menjadi catatan *expose* LKPP dalam penilaian level kematangan UKPBJ BPS yang sudah disampaikan ke PIC LKPP sejak tanggal 23 Mei 2025.

Dari kendala yang dihadapi tersebut, beberapa solusi telah dilakukan yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan:
 - a. Monitoring progres pemanfaatan sistem pengadaan seluruh satker secara berkala dan disampaikan melalui *Whatsapp Grup* PPK BPS seluruh Indonesia dan memanfaatkan PIC wilayah di UKPBJ untuk monitoring yang lebih detail;
 - b. Membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa (SIMANDARU) yang menampilkan data monitoring pemanfaatan sistem pengadaan satker secara *up to date* dengan basis data ISB API LKPP;
 - c. Melakukan penunjukan *data integrator API Gateway INAPROC* dan segera melakukan migrasi.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ: Berkoordinasi dengan Pusdiklat BPS untuk mengakomodir pelatihan JF PPBJ madya sesuai yang pernah diusulkan, dan mengakomodir pembiayaan pelatihan penjenjangan JF PPBJ Muda yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PBJ Universitas Diponegoro.
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ):

- a. Menyelesaikan kelengkapan dokumen bukti dukung catatan *ekspose* dan telah dikirimkan ke LKPP pada tanggal 23 Mei 2025;
- b. Berkoordinasi terus dengan PIC LKPP terkait progres reviu dokumen/bukti dukung catatan *expose* yang telah disampaikan;
- c. Mengirimkan surat resmi ke LKPP melalui surat Kepala Biro Umum Nomor B-15/02500/OT.040/2025 Tanggal 18 Desember 2025 Hal: Tindak Lanjut Catatan *Expose*.

Dari kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi perbaikan kinerja (rencana tindak lanjut) yang akan dilakukan di tahun 2026 ini khususnya Triwulan I 2026 yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan:
 - a. Pemantauan secara aktif oleh PIC wilayah terkait progres sementara penyesuaian RUP, penyelesaian transaksi e-purchasing dan pencatatan non tender tahun anggaran 2025.
 - b. Berkoordinasi dengan LKPP agar segera memverifikasi akun VAI BPS TA 2026 berdasarkan surat penunjukan yang telah disampaikan ke LKPP.
 - c. Berkoordinasi dengan tim Hukum pada Biro Humas dan Hukum terkait penyelesaian dokumen SK Penunjukan Data Integrator API Gateway INAPROC tertanda tangan dan berkoordinasi dengan LKPP terkait pelaksanaan migrasi.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ:
Membuat Nota Dinas Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro SDM untuk permohonan penjadwalan Ujikom Perjenjangan Muda dan Madya kepada LKPP bagi JF PPBJ yang telah menyelesaikan Pelatihan Perjenjangan Muda dan Madya di akhir tahun 2025.
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ):
Melakukan penyelesaian pemenuhan kelengkapan dokumen yang masih perlu dilakukan penyempurnaan/*update* berdasarkan catatan hasil reviu catatan *expose* LKPP untuk memperoleh UKPBJ dengan kategori Proaktif.

Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2026 Triwulan II s.d Triwulan IV 2026 yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan:
Melakukan penyesuaian/pengembangan sistem pemantauan pengadaan barang/jasa yang dibangun (SIMANDARU) setelah proses migrasi selesai dan setelah pedoman penilaian ITKP yang baru untuk periode tahun 2026-2029 sudah terbit.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ:
Melakukan pemantauan pemenuhan formasi JF PPBJ baik dari jalur kenaikan jenjang maupun dari Perpindahan Jabatan Lainnya (PJL).
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ):
Mengidentifikasi bukti dukung/dokumen yang perlu dilakukan *update* berdasarkan tahun terkini yaitu 2025 dan melakukan *update* bukti dukung/dokumen agar satu tahun setelah UKPBJ memperoleh proaktif dapat ditetapkan sebagai PKP (Pusat Keunggulan Pengadaan).

IKSK 3 : Tingkat Digitalisasi Arsip

Tingkat digitalisasi arsip adalah indikator yang menunjukkan tingkat pengelolaan arsip elektronik suatu lembaga atau instansi. Indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan ini meliputi kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); dan implementasi kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan.

Tahun 2025 capaian kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip sebesar 101,69 persen atau terealisasi sebesar 96,61 poin dari 95,00 poin yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IKSK 3. Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	95,00	96,61	101,69

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2025 yang disampaikan melalui Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor T/AK.01.00/100/2026 tanggal 6 Januari 2026, Badan Pusat Statistik memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan sebesar 96,61 dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan rincian yang terdiri atas: nilai hasil pengawasan kearsipan Eksternal sebesar 58,04 (bobot 60%) dan nilai hasil pengawasan internal sebesar 38,57 (bobot 40%). Pengawasan kearsipan merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan juga mengukur pengelolaan arsip elektronik yang diwujudkan dalam tingkat digitalisasi arsip sebagai salah satu indikator pada evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Adapun kendala dalam pengawasan kearsipan tahun 2025 pada Badan Pusat Statistik antara lain: Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Beberapa hasil nilai pengawasan kearsipan internal (ASKI) belum mencapai kategori "Sangat Memuaskan" sebanyak 8 unit pengolah dan unit kearsipan. Hal ini ini dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam penggunaan tata naskah dinas yang sesuai peraturan BPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas serta masih terbatasnya penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam persuratan.

Perkembangan kinerja penyelenggaraan kearsipan Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibanding dengan kinerja tahun 2024. Peningkatan kinerja terjadi pada aspek pembinaan. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja khususnya pada aspek yang mengalami penurunan kinerja pada tahun 2025 yaitu;

1. Aspek pengelolaan arsip dinamis dengan meningkatkan pemindahan arsip dari unit pengolah sehingga seluruh unit pengolah dapat secara rutin memindahkan arsipnya ke unit kearsipan, melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur secara rutin, dan melaksanakan penyerahan arsip statis secara rutin yang mewakili seluruh fungsi instansi di lingkup BPS.

2. Aspek sumber daya kearsipan dengan berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan arsiparis di lingkungan BPS serta melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi arsiparis dan pemenuhannya baik kuantitas maupun kompetensinya.

Selain itu, solusi yang dilakukan yaitu melakukan evaluasi keseluruhan terhadap semua aspek yang telah dinilai dan mensosialisasikan hal-hal yang akan menjadi penilaian ASKI tahun mendatang.

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2026 terkait upaya mempertahankan dan meningkatkan tingkat digitalisasi arsip yaitu:

1. Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi akan ditindaklanjuti dengan pembuatan piagam penghargaan dan akan dikirimkan ke seluruh unit pengolah/unit kearsipan untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan arsip pada setiap unit kerja menjadi lebih baik. Diharapkan dengan pengelolaan arsip yang semakin baik akan memberi kontribusi kinerja organisasi.
2. Memberikan pendampingan pada unit pengolah dalam melaksanakan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan sesuai prosedur dan secara rutin.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan kearsipan antara lain; JRA, Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, dll dengan memberikan bimbingan teknis, maupun mengikutsertakan pada diklat kearsipan sehingga meningkatkan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan arsiparis.

IKSK 4 : Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum

Tingkat kepuasan layanan Biro Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diterima/dirasakan oleh pegawai BPS (*user*). Layanan Biro Umum meliputi layanan kerumahtanggan, layanan BMN, layanan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pencetakan, kearsipan, dan ekspedisi.

Tahun 2025 capaian kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum sebesar 99,94 persen atau terealisasi sebesar 87,95 persen dari 88,00 persen yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IKSK 4. Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	Persen	88,00	87,95	99,94

Realisasi indikator tingkat kepuasan layanan Biro Umum tahun 2025 yang belum mencapai target dikarenakan beberapa kendala, antara lain persiapan minim di tengah rutinitas pekerjaan pokok setiap bagian, keterbatasan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan survei, rendahnya jumlah responden yang berpartisipasi meskipun telah dibuka periode perpanjangan pengisian. Beberapa upaya telah dilakukan di tahun 2025 yaitu memaksimalkan sumber daya waktu dan manusia yang dimiliki dengan meminimalisasi perubahan metode secara fundamental pada survei sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil di tahun sebelumnya, dan memperpanjang periode pengisian survei dengan memonitor data responden yg belum melakukan pengisian.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2026 untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Biro Umum (SKLBU) yang dihadiri kepala Biro Umum serta menjadikan evaluasi yang dilakukan sebagai pertimbangan pada pelaksanaan survei di tahun 2026.

3.2 Capaian Kinerja Biro Umum Terhadap Target Renstra

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Umum, jika dibandingkan dengan capaian target 2025, terdapat tiga indikator yang mampu melebihi target yang ditetapkan dan satu indikator yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan di awal tahun. Sedangkan

apabila dibandingkan dengan target di akhir periode renstra yaitu tahun 2029, maka capaian seluruh indikator di tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2029. Namun demikian terdapat satu indikator yang hampir mencapai target yang telah ditetapkan di akhir periode renstra (tahun 2029), yaitu Tingkat Digitalisasi Arsip dengan capaian terhadap target 2029 sebesar 99,60 persen.

Capaian kinerja terhadap target periode akhir renstra (tahun 2029) untuk masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja Biro Umum Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN					100,55	98,40
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Poin	3,66	3,74	3,68	100,55	98,40
Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)	Poin	89,60	91,50	90,07	100,52	98,44
Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	95,00	97,00	96,61	101,69	99,60
Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	Persen	88,00	90,00	87,95	99,94	97,72

*) Sumber data: Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025, hal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU.

Keberhasilan Biro Umum dalam mencapai target terutama untuk indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP), dan Tingkat Digitalisasi Arsip dikarenakan adanya komitmen seluruh pegawai untuk meningkatkan nilai ketiga indikator ini yang merupakan indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara satker di pusat dan satker di daerah juga menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja ini. Sedangkan masih belum tercapainya target indikator Tingkat

kepuasan layanan Biro Umum di Tahun 2025 disebabkan persiapan survei yang minim di tengah rutinitas pekerjaan pokok setiap bagian/fungsi, keterbatasan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan survei, serta rendahnya jumlah responden yang berpartisipasi meskipun periode pengisian diberikan perpanjangan.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

a. Output yang sudah dihasilkan

Dalam mendukung peran BPS terhadap prioritas nasional, prioritas presiden, dan isu strategis nasional, Biro Umum tahun 2025 sebagai salah satu unit kerja yang bersifat supporting telah menghasilkan output berupa:

- 1) Penyediaan layanan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran kegiatan dan pelaksanaan tugas BPS terkait prioritas nasional, prioritas presiden dan isu strategis nasional, seperti penyiapan ruang khusus Sekretariat SE2026.
- 2) Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan dan pelaksanaan tugas BPS terkait prioritas nasional, prioritas presiden dan isu strategis nasional, seperti melaksanakan pemilihan penyedia untuk kegiatan fullday meeting pembinaan kegiatan statistik sektoral, kegiatan Fullboard meeting untuk FGD Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, dsb.
- 3) Penyediaan layanan pencetakan laporan dan bahan untuk pimpinan, sebagai contoh Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, Laporan Hasil Survei Baseline Tahap I dan Tahap 2 Program MBG, Laporan Hasil Survei Khusus monitoring dan evaluasi program MBG, dan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, sehingga hasil kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas presiden dan isu strategis nasional dapat tersampaikan kepada masyarakat selaku pengguna data.
- 4) Penyediaan layanan pengiriman sebagai contoh pengiriman plakat dan sertifikat dalam rangka Award Desa Cantik.

b. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut

Sebagai unit supporting dalam mendukung peran BPS terhadap ketercapaian prioritas nasional, prioritas presiden, dan isu strategis nasional, beberapa **kendala** yang masih ditemui yaitu persiapan pengadaan yang seringkali mendesak waktunya dan kebutuhan belum bersifat fix sehingga sulit melakukan pemilihan penyedia yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan dengan jangka waktu persiapan yang pendek apalagi jika harus menggunakan sistem elektronik atau e-purchasing. Selain itu, pemenuhan permintaan pencetakan laporan dan bahan untuk pimpinan terkadang terkendala dengan waktu permintaan yang mendesak dan diluar jam kerja, ketersediaan *file* bahan cetak yang belum final dari *stakeholders*, dan peralatan cetak yang tersedia saat ini sudah *discontinue* serta belum tersedianya mesin cetak polimas/emboss/ponds untuk memenuhi permintaan dengan spesifikasi tertentu.

Beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu memperkuat koordinasi antar Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dengan PPK sehingga diperoleh kebutuhan yang fix, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait finalisasi file bahan cetak, memperbaiki mesin cetak, menggunakan pihak ketiga untuk permintaan cetak dengan dengan spesifikasi tertentu serta melaksanakan kerja lembur untuk penyelesaian pencetakan.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu merancang tabel monitoring target dan realisasi barang/jasa dan mengkoordinasikan secara berkala kepada PPK terkait rencana jadwal dan realisasi pengadaan. Selain itu, mengusulkan pengadaan mesin cetak yang baru sebagai pengganti mesin cetak yang sudah *discontinue* dan mesin cetak polimas/emboss/pond untuk memenuhi permintaan cetak dengan spesifikasi tertentu.

3.4 Prestasi dan Inovasi Biro Umum Tahun 2025

Selama tahun 2025 Biro Umum telah melakukan berbagai inovasi dan memperoleh berbagai prestasi yang diakui dengan adanya pemberian apresiasi dan penghargaan, baik dari internal maupun pihak eksternal BPS. Beberapa prestasi berupa penghargaan yang diterima Biro Umum tahun 2025 antara lain:

1. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa Penghargaan Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara”.



Gambar 7. Penyerahan Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip oleh ANRI

2. Piagam Penghargaan dari ANRI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memperoleh peringkat VII dengan kategori AA “Sangat Memuaskan” berdasarkan Pengawasan kearsipan Tahun 2024.



Gambar 8. Piagam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dari ANRI

3. Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2025 sebagai Juara 1 Kategori Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Menengah atas Capaian Belanja Produk Dalam Negeri di Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Perindustrian.



Gambar 9. Piagam Penghargaan P3DN Tahun 2025 dari Kementerian Perindustrian

4. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 sebagai Juara II Penjual Lelang Noneksekusi Wajib Terbaik untuk kementerian/lembaga di atas 100 satuan kerja dan Juara III Utilisasi BMN untuk

kementerian/lembaga di atas 100 satuan kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

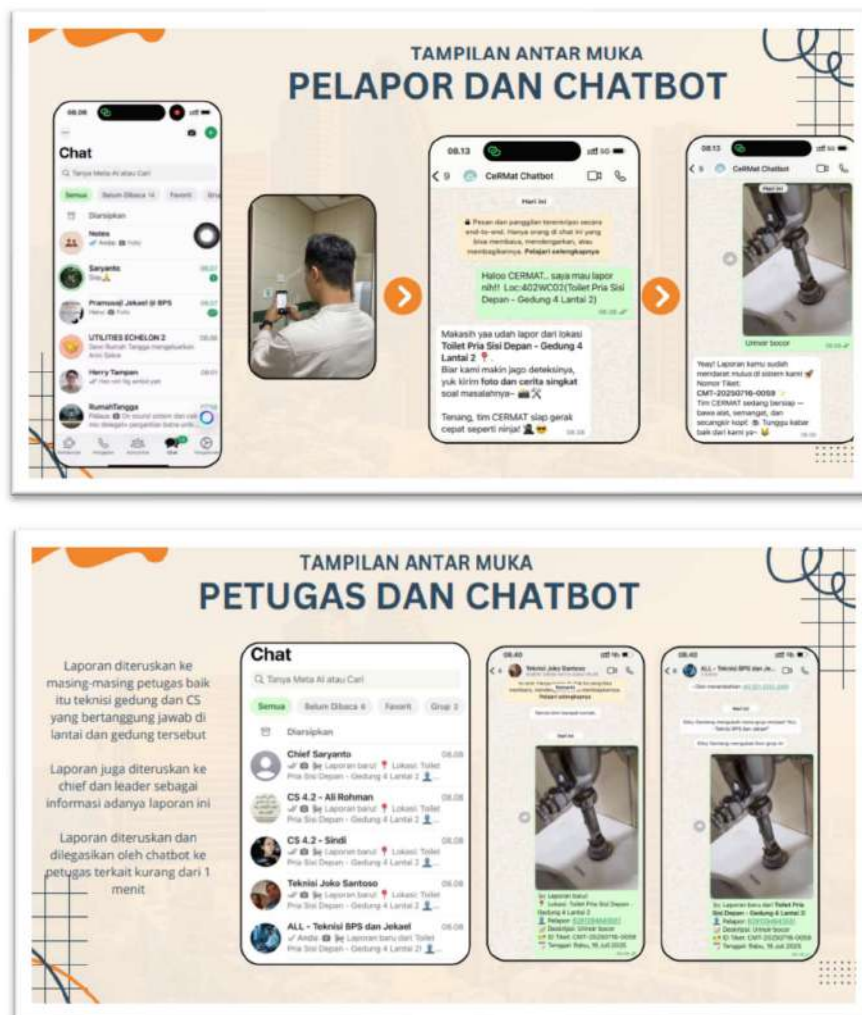


Gambar 10. Piagam Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 dari DJKN

Sedangkan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Biro Umum Tahun 2025 yaitu:

1. Pembuatan Aplikasi *Chatbot* untuk pengaduan terkait masalah kerusakan dan kebersihan. Pelaporan kerusakan dan kebersihan sarana prasarana di BPS hingga 2024 dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penanganan, lemahnya dokumentasi, rendahnya transparansi, serta berdampak pada penurunan produktivitas, meningkatnya biaya operasional, dan menurunnya kepuasan

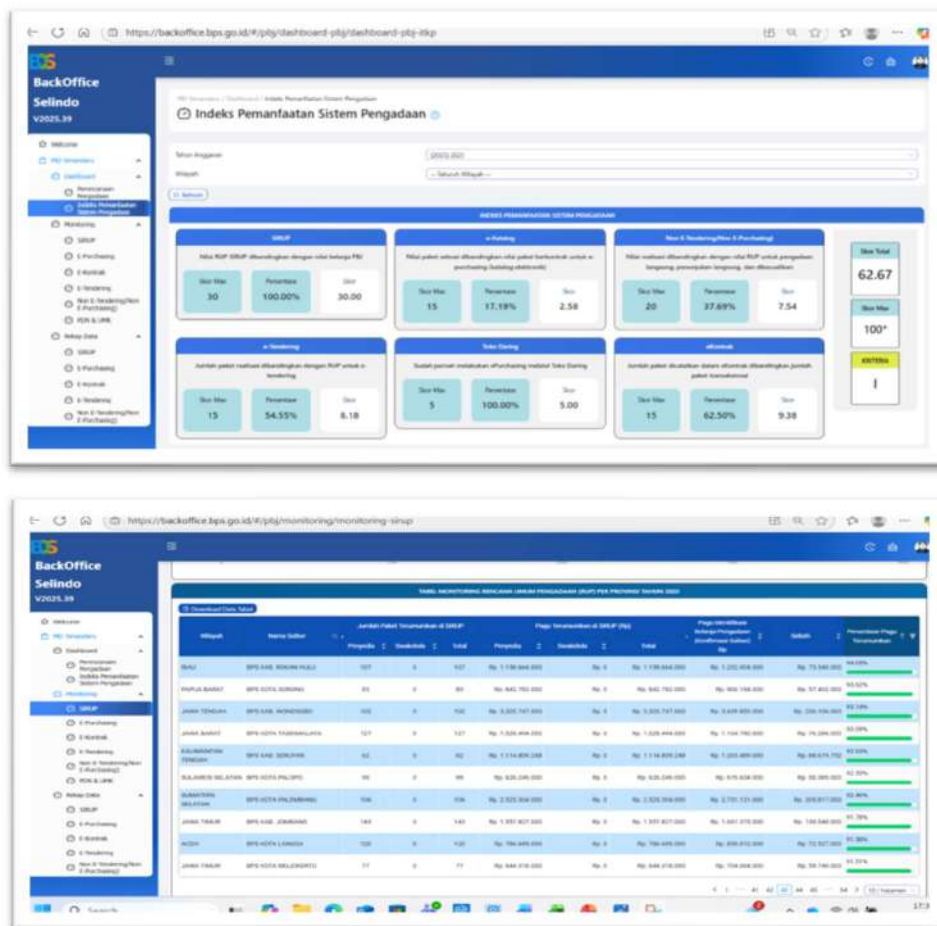
pegawai. Mengingat dalam kerangka Reformasi Birokrasi yang menuntut efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan sistem pelaporan yang cepat, responsif, dan mudah diakses, sehingga Aplikasi CERMAT (CEpat, Responsif, dan Maksimal Tindak Lanjut) dihadirkan sebagai solusi berbasis teknologi melalui pemanfaatan QR Code dan chatbot WhatsApp untuk mempermudah pelaporan, mempercepat tindak lanjut, memudahkan pemantauan, serta mendukung terwujudnya tata kelola sarana prasarana yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan internal serta lingkungan kerja di BPS.



Gambar 11. Tampilan Aplikasi CERMAT (CEpat, Responsif, dan Maksimal Tindak Lanjut)

2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan merupakan salah satu indikator yang diukur dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Selama ini

pemantauan pemanfaatan sistem pengadaan seluruh satker BPS dilakukan secara manual, sehingga perlu dilakukan inovasi dengan membangun sistem pemantauan yang berbasis teknologi sehingga mudah diakses, cepat dan datanya *up to date*. Sistem Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Terpadu (Simandaru) pada BackOffice dibangun agar seluruh Satker BPS dapat memantau progres pemanfaatan sistem Pengadaan (mencakup pengumuman RUP, Penyelesaian E-Purchasing, E-Tendering, E-Kontrak, dan Pencatatan Non Tender/Non E-Purchasing Non E-Tendering) dengan data yang *up to date* secara harian dan secara mandiri. Hal ini dikarenakan Data yang tampil dalam PBJ SIMANDARU telah terkoneksi dengan ISB melalui API LKPP sehingga dapat *terupdate* datanya secara harian. Pembangunan Simandaru ini, yang menampilkan monitoring pemanfaatan sistem Pengadaan barang/jasa hingga level satker, merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dari sisi pemanfaatan sistem Pengadaan.



Gambar 12. Tampilan Sistem Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Terpadu (Simandaru) pada BackOffice

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Tahun 2025 Biro Umum berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 100,68 persen. Sedangkan dari sisi anggaran, Biro Umum berhasil menyerap anggaran sebesar 92,09 persen atau sebesar Rp119.404.930.629,- dari alokasi anggaran yang dapat dipergunakan sebesar Rp129.655.907.000,-. Apabila dilihat dari sisi efisiensi, yang merupakan perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran, diperoleh efisiensi sebesar 1,09 (100,68 dibagi 92,09). Mengingat nilai efisiensi diatas atau sama dengan 1 maka dapat disimpulkan bahwa Biro Umum telah efisien dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Berikut efisiensi per sasaran kegiatan dan secara total:

Tabel 14. Nilai Efisiensi per Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi* (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(1)	(2)
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN				100,68	129.655.907.000	119.404.930.629	92,09	1,09
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Poin	3,66	3,68	100,55				
Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)	Poin	89,60	90,07	100,52				
Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	95,00	96,61	101,69				
Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	Persen	88,00	87,95	99,94				
Total					129.655.907.000	119.404.930.629	92,09	1,09

Efisiensi tersebut sejalan dengan beberapa upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh Biro Umum selama tahun 2025, antara lain dengan melakukan penghematan terhadap biaya konsumsi rapat dan mengurangi penggunaan listrik ruangan dengan memaksimalkan zoom

meeting untuk pelaksanaan rapat, melakukan penghematan listrik, pengurangan biaya operasional kantor dengan penerapan sistem WFA dan WFO, serta efisiensi dalam penggunaan kertas dan alat tulis kantor dengan cara memaksimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI dan tanda tangan elektronik (e-ttd).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja Biro Umum merupakan perwujudan kewajiban Biro Umum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik. Melalui penerapan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Biro Umum terus berupaya menyelaraskan target kinerja dengan tujuan strategis organisasi, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Badan Pusat Statistik yang tentunya dapat berkontribusi pada pencapaian visi BPS sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPS 2025-2029 yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi sarana evaluasi yang objektif untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang berkelanjutan. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa Biro Umum di tahun 2025 ini telah mampu mencapai bahkan mampu melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Kesimpulan ini tercermin dari capaian kinerja sasaran Biro Umum yaitu “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN” sebesar 100,68 persen.

Dari empat Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN”, terdapat tiga indikator yang capaian kerjanya telah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan terdapat satu indikator kinerja yang capaiannya kurang dari target yang ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran tersebut yaitu:

1. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Pengelolaan Aset (IPA)” pada tahun 2025 adalah 100,55 persen, dengan target sebesar 3,66 poin dan realisasi sebesar 3,68 poin;

2. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP)” pada tahun 2025 adalah 100,52 persen, dengan target sebesar 89,60 poin dan realisasi sebesar 90,07 poin;
3. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Tingkat Digitalisasi Arsip” pada tahun 2025 adalah 101,69 persen, dengan target sebesar 95 poin dan realisasi sebesar 96,61 poin;
4. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum” pada tahun 2025 adalah 99,94 persen, dengan target sebesar 88,00 persen dan realisasi sebesar 87,95 persen;

Dengan capaian kinerja tersebut dan dengan capaian realisasi anggaran Biro Umum sebesar 92,09 persen maka tingkat efisiensi Biro Umum diperoleh nilai sebesar 1,09 yang menunjukkan bahwa Biro Umum dinilai efisien. Dengan kata lain, Biro Umum berhasil mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2025 dengan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang baik dan efisien. Dengan demikian, Biro Umum dapat dikatakan telah berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan visi dan misi BPS 2025-2029 melalui program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS 2025-2029.

4.2 Rekomendasi perbaikan kinerja

Dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja Biro Umum pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan antisipasi terhadap permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja. Selain itu, perlu dirumuskan juga rencana tindak lanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Awal)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Gede Hendrayana H., SE, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Agus Gede Hendrayana H., SE, M.Si
NIP. 19780612199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

N _o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	Indeks Pengelolaan Asct (IPA)	3,66 Poin
2.		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,60 Poin
3.		Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00 Poin
4.		Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00 Persen

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	2885 Dukungan Manajemen BPS Lainnya	Rp.	127.651.245.000
	Jumlah	Rp.	127.651.245.000

Plt. Sekretaris Utama



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Pulembang, 24 Januari 2025
Kepala Biro Umum



Agus Gede Hendrayana H., SE, M.Si
NIP. 19780612199912 1 001

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 1)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Gede Hendrayana H., SE, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum


Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
NIP. 19690213199112 1 001

Jakarta, 03 Maret 2025
Pihak Pertama

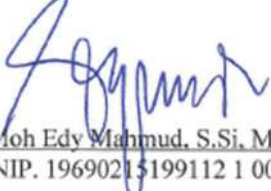
Agus Gede Hendrayana H., SE, M.Si
NIP. 19780612199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,66 Poin
2.		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,60 Poin
3.		Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00 Poin
4.		Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00 Persen

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	2885 Dukungan Manajemen BPS Lainnya	Rp.	127.651.245.000
	Jumlah	Rp.	127.651.245.000

Plt. Sekretaris Utama


Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
 NIP. 19690215199112 1 001

Jakarta, 03 Maret 2025
Kepala Biro Umum


Agus Gede Hendrayana H., SE, M.Si
 NIP. 19780612199912 1 001

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 2)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Wibisono S.ST., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

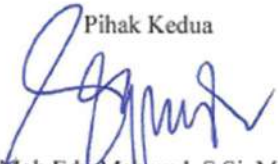
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
NIP. 19690215199112 1 001

Jakarta, 25 Maret 2025
Pihak Pertama

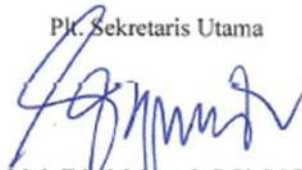
Martin Wibisono S.ST., M.Si
NIP. 19770218199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,66 Poin
2.		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,60 Poin
3.		Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00 Poin
4.		Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00 Persen


Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	2885 Dukungan Manajemen BPS Lainnya	Rp.	126.481.596.000
Jumlah		Rp.	126.481.596.000

Pk. Sekretaris Utama



Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
NIP. 19690215199112 1 001

Jakarta, 25 Maret 2025
Kepala Biro Umum



Martin Wibisono S.Si., M.Si
NIP. 19770218199912 1 001

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 3)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Wibisono S.ST., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Jakarta, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama


Martin Wibisono S.ST., M.Si
NIP. 19770218199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,66 Poin
2.		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,60 Poin
3.		Tingkat Digitalisasi Arsip	95,00 Poin
4.		Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum	88,00 Persen

Program/Kegiatan	Anggaran
1) 2885 Dukungan Manajemen BPS Lainnya	Rp. 141.422.305.000
Jumlah	Rp. 141.422.305.000

Plt. Sekretaris Utama

Dr. Pudji Smeritini, M.App.Stat
NIP. 19710315199312 2 002

Jakarta, 23 Oktober 2025
Kepala Biro Umum

Martin Wibisono S.ST., M.Si
NIP. 19770218199912 1 001

Lampiran 5. Jumlah Pegawai Biro Umum Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2025

No	Pendidikan	Golongan									Jumlah	
		PNS			PPPK							
		IV	III	II	IX	VII	V	III	I	Paruh Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	S2	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2	S1/DIV	-	50	-	1	-	-	-	-	-	-	51
3	DIII	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	9
4	SLTA/SMA/Sederajat	-	14	3	-	-	70	8	-	-	-	95
5	SLTP/SMP/Sederajat	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	9
6	SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Jumlah		7	76	18	1	1	70	8	4	1	1	186

Lampiran 6. Jumlah Pegawai Biro Umum Menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jabatan					Jumlah
		Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Subbagian	Fungsional	Staf	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S2	1	2	-	15	-	18
2	S1/DIV	-	-	2	39	10	51
3	DIII	-	-	-	9	-	9
4	SLTA/SMA/Sederajat	-	-	-	20	75	95
5	SLTP/SMP/Sederajat	-	-	-	-	9	9
6	SD/Sederajat	-	-	-	-	4	4
Jumlah		1	2	2	83	98	186

Lampiran 7. Surat Hasil Penilaian Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT), JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710;
CALL CENTER (KEMENKEU PRIME): 134; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-7/KN/KN.2/2026 15 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 Kementerian/Lembaga

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Terlampir)

Sehubungan dengan perhitungan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui, perhitungan IPA Tahun 2025 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan BMN Tahun 2025 (KMK 39/2025) dengan memperhatikan kebijakan pembentukan Kabinet Merah Putih (KMP).
2. Perhitungan sementara berdasarkan formula, sumber data, dan periode data sebagaimana diatur pada KMK 39/2025 dengan beberapa penyesuaian terhadap Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan penggabungan, dimana pada prinsipnya ditentukan dengan data target dan capaian pada Kementerian/Lembaga (K/L) pengampu atau K/L sebelum pemisahan, kecuali untuk penetapan status penggunaan atas Barang Milik Negara (BMN) yang mengalami likuidasi pada K/L Pengampu.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan kertas kerja perhitungan sementara IPA Tahun 2025 yang dapat diakses pada tautan kemenkeu.go.id/IPA sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menindaklanjuti indeks parameter/subparameter yang masih di bawah indeks 3 (Baik) sesuai ketentuan.
4. Lebih lanjut, dalam hal terdapat penyesuaian/sanggah atas perhitungan sementara dimaksud, Kementerian/Lembaga dapat mempersiapkan permohonan sanggah disertai dokumen dukung sesuai poin 4 dan sumber data pada KMK 39/2025 melalui Portal RB sesuai mekanisme sanggah yang ditentukan oleh Kementerian PANRB.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara



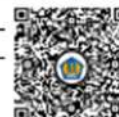
Utandatangan secara elektronik
Encep Sudarwan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB

DAFTAR TUJUAN SURAT

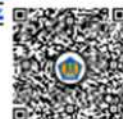
No.	Kementerian/Lembaga
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2	Dewan Perwakilan Rakyat
3	Dewan Perwakilan Daerah
4	Badan Pemeriksa Keuangan
5	Mahkamah Agung
6	Mahkamah Konstitusi
7	Komisi Yudisial
8	Kejaksaan Republik Indonesia
9	Kementerian Sekretariat Negara
10	Kementerian Dalam Negeri
11	Kementerian Luar Negeri
12	Kementerian Pertahanan
13	Kementerian Hukum
14	Kementerian Hak Asasi Manusia
15	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
16	Kementerian Keuangan
17	Kementerian Pertanian
18	Kementerian Perindustrian
19	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
20	Kementerian Perhubungan
21	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
22	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
23	Kementerian Kebudayaan
24	Kementerian Kesehatan
25	Kementerian Agama
26	Badan Penyelenggara Haji
27	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
28	Kementerian Ketenagakerjaan
29	Kementerian Sosial
30	Kementerian Kehutanan
31	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
32	Kementerian Kelautan dan Perikanan
33	Kementerian Pekerjaan Umum
34	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
36	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
37	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
38	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
39	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
40	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
41	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
42	Kementerian Pariwisata



No.	Kementerian/Lembaga
43	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
44	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
45	Badan Riset dan Inovasi Nasional
46	Kementerian Koperasi
47	Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
48	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
50	Badan Siber dan Sandi Negara
51	Badan Intelijen Negara
52	Dewan Ketahanan Nasional
53	Badan Pusat Statistik
54	Kementerian PPN/BAPPENAS
55	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
56	Perpustakaan Nasional
57	Kementerian Komunikasi dan Digital
58	Kepolisian Negara RI
59	Badan Pengawas Obat dan Makanan
60	Lembaga Ketahanan Nasional
61	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
62	Badan Narkotika Nasional
63	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
64	Kementerian Transmigrasi
65	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
66	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
67	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
68	Komisi Pemilihan Umum
69	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
70	Badan Informasi Geospasial
71	Badan Standardisasi Nasional
72	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
73	Lembaga Administrasi Negara
74	Arsip Nasional Republik Indonesia
75	Badan Kepegawaian Negara
76	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
77	Kementerian Perdagangan
78	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
79	Komisi Pemberantasan Korupsi
80	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
81	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
82	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
83	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
84	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
85	Ombudsman RI
86	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
87	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
88	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
89	Badan Pengawas Pemilihan Umum
90	Lembaga Penyiaran Publik RRI
91	Lembaga Penyiaran Publik TVRI

No.	Kementerian/Lembaga
92	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
93	Badan Keamanan Laut
94	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
95	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
96	Badan Pangan Nasional
97	Otorita Ibu Kota Negara
98	Badan Karantina Indonesia
99	Badan Gizi Nasional

No	Kode BA	Kementerian/ Lembaga	Link Folder KI
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	https://bit.ly/PA_BA001
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	https://bit.ly/PA_BA002
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	https://bit.ly/PA_BA004
4	005	MAHKAMAH AGUNG	https://bit.ly/PA_BA005
5	006	KEJAKSAAN RI	https://bit.ly/PA_BA006
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	https://bit.ly/PA_BA007
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	https://bit.ly/PA_BA010
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	https://bit.ly/PA_BA011
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	https://bit.ly/PA_BA012
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	https://bit.ly/PA_BA015
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	https://bit.ly/PA_BA018
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	https://bit.ly/PA_BA019
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	https://bit.ly/PA_BA020
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	https://bit.ly/PA_BA022
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	https://bit.ly/PA_BA024
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	https://bit.ly/PA_BA025
17	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	https://bit.ly/PA_BA026
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL	https://bit.ly/PA_BA027
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	https://bit.ly/PA_BA032
20	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	https://bit.ly/PA_BA035
21	036	KEMENKO BID. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	https://bit.ly/PA_BA036
22	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	https://bit.ly/PA_BA041
23	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	https://bit.ly/PA_BA047
24	048	KEMENTERIAN PENYAGUJANAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	https://bit.ly/PA_BA048
25	050	BADAN INTELUJEN NEGARA	https://bit.ly/PA_BA050
26	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	https://bit.ly/PA_BA051
27	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	https://bit.ly/PA_BA052
28	054	BADAN PUSAT STATISTIK	https://bit.ly/PA_BA054
29	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	https://bit.ly/PA_BA055
30	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	https://bit.ly/PA_BA056
31	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	https://bit.ly/PA_BA057
32	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	https://bit.ly/PA_BA059
33	060	KEPOLISIAN NEGARA RI	https://bit.ly/PA_BA060
34	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	https://bit.ly/PA_BA063
35	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	https://bit.ly/PA_BA064
36	065	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HLIRISASI/BKPM	https://bit.ly/PA_BA065
37	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	https://bit.ly/PA_BA066
38	068	KEMENTERIAN KEPENDULUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKBN	https://bit.ly/PA_BA068
39	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	https://bit.ly/PA_BA074
40	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	https://bit.ly/PA_BA075
41	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	https://bit.ly/PA_BA076
42	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	https://bit.ly/PA_BA077
43	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	https://bit.ly/PA_BA078
44	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	https://bit.ly/PA_BA083
45	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	https://bit.ly/PA_BA084
46	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	https://bit.ly/PA_BA085
47	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	https://bit.ly/PA_BA086
48	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	https://bit.ly/PA_BA087
49	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	https://bit.ly/PA_BA088
50	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	https://bit.ly/PA_BA089
51	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	https://bit.ly/PA_BA090
52	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA	https://bit.ly/PA_BA092
53	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	https://bit.ly/PA_BA093
54	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	https://bit.ly/PA_BA095
55	100	KOMISI YUDISIAL	https://bit.ly/PA_BA100
56	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	https://bit.ly/PA_BA103
57	104	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI	https://bit.ly/PA_BA104
58	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	https://bit.ly/PA_BA106
59	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	https://bit.ly/PA_BA107
60	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	https://bit.ly/PA_BA108
61	110	OMBUDSMAN RI	https://bit.ly/PA_BA110
62	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	https://bit.ly/PA_BA111
63	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	https://bit.ly/PA_BA112
64	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	https://bit.ly/PA_BA113
65	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	https://bit.ly/PA_BA115
66	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	https://bit.ly/PA_BA116
67	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	https://bit.ly/PA_BA117
68	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN	https://bit.ly/PA_BA118
69	119	BADAN KEAMANAN LAUT	https://bit.ly/PA_BA119
70	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	https://bit.ly/PA_BA122



No	Kode BA	Kementerian/ Lembaga	Link Folder KL
71	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	https://s.id/IPABA123
72	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	https://s.id/IPA_BA124
73	125	BADAN PANGAN NASIONAL	https://s.id/IPA_BA125
74	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	https://s.id/IPA_BA126
75	127	BADAN KARANTINA NASIONAL	https://s.id/IPA_BA127
76	128	BADAN GIZI NASIONAL	s.kemendau.go.id/IPABA128
77	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	s.kemendau.go.id/IPABA129
78	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	s.kemendau.go.id/IPABA130
79	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	s.kemendau.go.id/IPABA131
80	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	s.kemendau.go.id/IPABA132
81	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	s.kemendau.go.id/IPABA134
82	135	KEMENTERIAN HUKUM	s.kemendau.go.id/IPABA135
83	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	s.kemendau.go.id/IPABA136
84	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	s.kemendau.go.id/IPABA137
85	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	s.kemendau.go.id/IPABA138
86	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI	s.kemendau.go.id/IPABA139
87	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	s.kemendau.go.id/IPABA140
88	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	s.kemendau.go.id/IPABA141
89	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	s.kemendau.go.id/IPABA142
90	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	s.kemendau.go.id/IPABA143
91	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	s.kemendau.go.id/IPABA144
92	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	s.kemendau.go.id/IPABA145
93	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	s.kemendau.go.id/IPABA146
94	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	s.kemendau.go.id/IPABA147
95	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	s.kemendau.go.id/IPABA148
96	149	KEMENTERIAN KOPERASI	s.kemendau.go.id/IPABA149
97	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	s.kemendau.go.id/IPABA150
98	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	s.kemendau.go.id/IPABA151
99	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	s.kemendau.go.id/IPABA152

Lampiran 8. Surat Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Gedung LKPP - Komplek Posuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 1550/D.2.1/01/2026 21 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Yth. Kepala UKPBJ Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 6 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor: B/77/RB.04/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Permohonan Data Hasil Evaluasi Meso Tahun 2025, berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Dengan diterbitkannya SE Kepala LKPP sebagaimana dimaksud pada nomor (1), maka Surat Sekretaris Utama LKPP nomor: 28006/SES/12/2025 tanggal 3 Desember 2025 hal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025 dinyatakan sudah tidak berlaku.
3. Memperhatikan hal di atas, hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional. Hasil Penilaian ITKP 2025 sebagaimana terlampir bersama surat ini.
4. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 akan kami tayangkan pada menu Dashboard ITKP pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2025. Dashboard ITKP 2025 dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Transformasi,
Pemantauan, dan Evaluasi
Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Fadli Arif

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : D1pOb7
Nomor Tiket : SK202601210033

4. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Final Tahun 2025

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBI	Indikator Tingkat Kemampuan UKPBU	Skor ITKP	Preklat	
1	Araja Nasional Republik Indonesia	LEMBAGA	10.00	4.63	0.00	3.95	1.00	4.06	23.69	27.88	35.56	37.08	Baik	
2	Badan Siasat Nasional	LEMBAGA	8.21	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	18.89	1.47	40.00	90.36	Cukup	
3	Badan Informasi Geospasial	LEMBAGA	9.56	5.00	0.00	2.91	0.00	5.00	22.27	22.50	40.00	54.77	Baik	
4	Badan Intelijen Negara	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	4.00	0.00	5.00	24.00	30.00	40.00	84.00	Sangat Baik	
5	Badan Karantina Indonesia	LEMBAGA	5.93	0.00	0.00	0.00	1.00	1.79	8.11	12.00	35.56	55.69	Baik	
6	Badan Kemanusiaan	LEMBAGA	10.00	4.96	5.00	3.93	0.00	3.58	26.17	14.00	24.87	66.64	Cukup	
7	Badan Kepagawean Negara	LEMBAGA	10.00	4.78	3.03	3.96	1.00	4.78	27.91	24.44	40.00	91.95	Sangat Baik	
8	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	LEMBAGA	6.46	2.70	0.00	0.00	1.00	4.05	14.21	16.91	40.00	71.12	Baik	
9	Badan Narkotika Nasional	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	3.27	1.00	4.17	33.44	7.50	40.00	70.94	Baik	
10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	3.86	1.00	1.75	21.61	10.91	0.00	32.52	Kurang	
11	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	LEMBAGA	7.78	3.00	0.00	0.00	0.00	1.92	14.70	0.00	0.00	20.70	Kurang	
12	Badan Nasional Pengetahuan Perikanan	LEMBAGA	6.96	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	15.96	0.00	0.00	15.96	Kurang	
13	Badan Pangan Nasional	LEMBAGA	6.68	0.00	0.00	2.05	1.00	5.00	17.74	12.00	17.74	47.52	Kurang	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	2.61	3.90	1.00	4.39	16.90	35.56	90.66	Baik	
15	Badan Perencanaan Keuangan	LEMBAGA	9.91	4.21	0.00	3.60	1.00	3.55	22.27	18.00	35.56	75.83	Baik	
16	Badan Pengawas Obat dan Makanan	LEMBAGA	9.82	5.00	3.85	3.70	1.00	4.74	28.11	20.15	40.00	88.26	Baik	
17	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	LEMBAGA	10.00	4.42	0.00	2.17	1.00	4.75	22.84	30.00	35.56	57.90	Baik	
18	Badan Penyelenggara Tenaga Suluh	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	2.95	1.00	5.00	33.91	5.45	4.44	13.84	Kurang	
19	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	LEMBAGA	10.00	5.00	5.00	4.00	1.00	4.52	29.52	30.00	40.00	99.52	Sangat Baik	
20	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	LEMBAGA	10.00	5.00	2.65	0.00	1.00	4.66	23.31	Dikecualikan	Dikecualikan	77.70	Baik	
21	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	LEMBAGA	7.41	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	22.23	Dikecualikan	Dikecualikan	74.10	Baik	
22	Badan Pusat Statistik	LEMBAGA	10.00	5.00	4.68	3.85	1.00	4.95	28.88	25.83	35.56	90.07	Sangat Baik	
23	Badan Siasat dan Intelijen Nasional	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	3.92	1.00	4.78	24.68	25.28	40.00	59.94	Baik	
24	Badan SAR Nasional/Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	LEMBAGA	7.41	5.00	0.00	0.00	1.00	4.40	17.81	6.75	22.22	46.78	Kurang	
25	Badan Siber dan Sandi Negara	LEMBAGA	10.00	5.00	3.63	3.58	1.00	4.43	27.63	21.57	40.00	91.20	Sangat Baik	
26	Badan Standarisasi Nasional	LEMBAGA	10.00	5.00	4.96	3.95	1.00	5.00	30.67	21.00	35.56	86.67	Baik	
27	Kepolisian Agung RI	LEMBAGA	1.41	4.94	4.95	0.00	1.00	3.47	22.78	30.00	35.56	88.84	Baik	
28	Kementerian Agama	KEMENTERIAN	9.86	5.00	0.00	0.00	1.00	3.80	19.66	28.57	35.56	83.79	Baik	
29	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	KEMENTERIAN	10.00	1.81	0.00	2.56	1.00	3.44	21.03	8.77	35.56	66.34	Cukup	
30	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	KEMENTERIAN	10.00	5.00	3.46	3.73	1.00	4.81	30.00	30.00	40.00	95.00	Sangat Baik	
31	Kementerian Dalam Negeri	KEMENTERIAN	10.00	5.00	2.87	3.82	1.00	4.67	26.96	28.13	40.00	95.09	Sangat Baik	
32	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	KEMENTERIAN	10.00	0.00	0.00	2.98	1.00	4.14	18.12	21.75	40.00	79.87	Baik	
33	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	KEMENTERIAN	9.87	4.70	3.33	2.33	1.00	2.94	24.37	23.97	40.00	87.94	Baik	
34	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	2.88	1.00	5.03	22.33	20.57	40.00	83.10	Baik	
35	Kementerian Haji dan Umroh	KEMENTERIAN	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	Kurang	
36	Kementerian Hak Asasi Manusia	KEMENTERIAN	10.00	5.00	5.00	3.98	1.00	4.89	29.87	30.00	40.00	99.37	Sangat Baik	
37	Kementerian Hukum	KEMENTERIAN	10.00	5.00	5.00	3.98	1.00	4.89	29.87	30.00	40.00	99.87	Sangat Baik	
38	Kementerian Informatika dan Komunikasi	KEMENTERIAN	10.00	5.00	5.00	3.98	1.00	4.89	29.87	30.00	40.00	99.87	Sangat Baik	
39	Kementerian Investasi dan BKKP	KEMENTERIAN	7.31	5.00	4.06	4.00	0.00	3.88	24.27	13.85	24.87	64.79	Cukup	
40	Kementerian Kekuasaan Dalam Negeri	KEMENTERIAN	10.00	5.00	4.91	0.00	2.16	1.00	4.70	22.97	29.09	40.00	92.04	Sangat Baik
41	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN	1.23	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	17.24	30.00	40.00	67.24	Baik	
42	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	3.82	1.00	4.89	24.31	27.04	40.00	91.55	Sangat Baik	
43	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	KEMENTERIAN	9.90	5.00	4.80	3.11	1.00	4.16	28.17	21.49	40.00	89.66	Baik	
44	Kementerian Kesehatan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.97	19.97	17.71	40.00	77.68	Baik	
45	Kementerian Kewilayahan	KEMENTERIAN	10.00	3.50	0.00	3.42	1.00	4.13	22.26	13.71	40.00	75.97	Baik	
46	Kementerian Luar Negeri	KEMENTERIAN	10.00	5.00	4.29	3.42	1.00	4.44	29.55	23.84	40.00	92.03	Sangat Baik	
47	Kementerian Komunikasi dan Digital	KEMENTERIAN	10.00	3.43	0.00	2.54	1.00	4.62	21.59	29.09	35.56	66.24	Baik	
48	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Integrasi, dan Pemasaran	KEMENTERIAN	1.17	0.00	0.00	4.00	0.00	Dikecualikan	14.60	3.00	24.87	44.27	Kurang	



No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBI	Indikator Tingkat Kemampuan UKPBU	Skor ITKP	Preklat
49	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	3.76	3.43	1.00	5.00	25.24	6.00	35.56	69.00	Cukup
50	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	KEMENTERIAN	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	12.04	40.00	52.06	Cukup
51	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	KEMENTERIAN	10.00	4.75	3.47	4.00	1.00	5.00	21.20	24.00	40.00	92.20	Sangat Baik
52	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	KEMENTERIAN	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	18.00	40.00	58.00	Cukup
53	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	KEMENTERIAN	10.00	5.00	3.42	4.00	1.00	5.00	28.42	15.00	40.00	83.42	Baik
54	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	KEMENTERIAN	0.17	0.00	0.00	4.00	0.00	Dikecualikan	14.40	3.00	26.67	44.27	Kurang
55	Kementerian Koperasi	KEMENTERIAN	9.48	4.30	5.00	3.52	1.00	4.70	28.40	23.18	40.00	91.58	Sangat Baik
56	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	KEMENTERIAN	9.98	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	18.90	30.00	40.00	88.90	Baik
57	Kementerian Luar Negeri	KEMENTERIAN	10.00	4.49	0.00	3.96	1.00	3.99	23.34	3.00	40.00	71.34	Baik
58	Kementerian Pariwisata	KEMENTERIAN	9.72	4.70	3.33	2.53	1.00	2.52	24.12	12.00	40.00	76.13	Baik
59	Kementerian Perencanaan Umum	KEMENTERIAN	9.41	5.00	3.88	3.59	1.00	4.78	27.96	26.15	40.00	84.11	Sangat Baik
60	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	KEMENTERIAN	7.25	5.00	0.00	0.00	1.00	3.64	16.89	21.43	35.56	73.08	Baik
61	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN	10.00	5.00	4.07	4.00	1.00	5.00	29.07	19.09	40.00	88.16	Baik
62	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KEMENTERIAN	3.96	3.81	0.00	2.21	1.00	3.13	19.11	14.29	22.22	55.62	Cukup
63	Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN	5.03	4.54	3.85	2.52	1.00	4.44	22.18	24.00	35.56	61.74	Baik
64	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	KEMENTERIAN	10.00	4.91	0.00	2.86	1.00	4.70	22.87	29.08	40.00	82.06	Sangat Baik
65	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	KEMENTERIAN	10.00	4.91	0.00	2.86	1.00	4.70	22.87	29.09	40.00	92.06	Sangat Baik
66	Kementerian Perdagangan	KEMENTERIAN	0.67	4.68	0.00	3.43	1.00	2.55	20.53	30.00	40.00	90.53	Sangat Baik
67	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	KEMENTERIAN	8.98	4.29	0.00	2.95	1.00	3.32	20.54	21.25	40.00	81.79	Baik
68	Kementerian Perhubungan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	2.70	2.50	1.00	4.26	25.46	16.75	40.00	82.21	Baik
69	Kementerian Perindustrian	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	3.79	1.00	4.82	24.81	21.71	40.00	86.52	Baik
70	Kementerian Perikanan	KEMENTERIAN	1.51	4.95	5.00	3.26	1.00	4.26	27.00	30.00	40.00	97.00	Sangat Baik
71	Kementerian Pertahanan	KEMENTERIAN	10.00	4.67	0.00	0.00	1.00	3.99	19.66	17.25	40.00	76.91	Baik
72	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	KEMENTERIAN	9.41	5.00	3.88	3.59	1.00	4.78	27.96	26.15	40.00	84.11	Sangat Baik
73	Kementerian Sastra dan Kebudayaan	KEMENTERIAN	5.40	5.00	2.42	0.00	1.00	3.99	27.89	11.66	35.56	65.11	Cukup
74	Kementerian Sosial	KEMENTERIAN	10.00	0.00	0.00	3.60	1.00	3.75	23.55	26.00	35.56	64.91	Baik
75	Kementerian Transmigrasi	KEMENTERIAN	10.00	0.00	0.00	2.98	1.00	4.14	18.12	21.75	40.00	79.87	Baik
76	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	KEMENTERIAN	10.00	4.30	5.00	3.82	1.00	4.70	26.82	24.55	40.00	89.47	Sangat Baik
77	Kepolisian Negara Republik Indonesia	LEMBAGA	1.29	5.00	0.00	0.00	1.00	3.42	17.71	30.00	35.56	53.27	Baik
78	Komis Pemberantasan Korupsi	LEMBAGA	10.00	5.00	3.67	3.73	1.00	4.35	27.75	15.52	35.56	76.33	Baik
79	Komis Pemilihan Umum	LEMBAGA	10.00	3.79	0.00	0.00	1.00	3.82	17.81	7.40	17.78	42.79	Kurang
80	Komis Yudisial	LEMBAGA	9.29	3.00	2.71	0.00	0.00	2.90	19.47	20.00	17.78	37.25	Cukup

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemudahan UKPSI	Skor IKSP	Predikat
92	Setoran Jendral Dewan Perwakilan Daerah	LEMBAGA	9.99	5.00	0.00	2.40	1.00	5.00	21.39	30.00	35.56	85.95	Baik
93	Setoran Jendral Dewan Perwakilan Rakyat	LEMBAGA	10.00	5.00	3.19	4.00	1.00	4.50	27.69	24.00	40.00	91.69	Sangat Baik
94	Setoran Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	LEMBAGA	9.84	5.00	0.00	0.00	1.00	2.50	18.34	30.00	0.00	48.34	Kurang
95	Setoran Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat	LEMBAGA	9.49	5.00	5.00	3.52	1.00	5.00	29.01	12.26	40.00	81.27	Baik
96	Tertara Nasional Indonesia	LEMBAGA	8.51	4.95	5.00	3.28	1.00	4.26	27.00	30.00	40.00	97.00	Sangat Baik
97	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	Provinsi	8.56	4.77	2.84	0.60	0.00	4.09	20.78	21.20	40.00	81.98	Baik
98	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Provinsi	10.00	5.00	4.88	5.94	1.00	4.99	29.81	27.39	40.00	97.21	Sangat Baik
99	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	Provinsi	10.00	5.00	3.99	3.42	1.00	4.13	27.54	26.09	40.00	93.63	Sangat Baik
100	Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu	Provinsi	9.84	4.67	0.00	0.00	0.00	4.52	19.03	18.84	40.00	77.87	Baik
101	Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta	Provinsi	10.00	5.00	3.56	3.33	1.00	4.89	28.28	18.67	40.00	89.95	Baik
102	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	10.00	5.00	4.97	2.39	1.00	4.71	28.07	18.21	40.00	86.28	Baik
103	Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	Provinsi	10.00	4.59	0.00	0.00	1.00	3.95	19.54	10.48	40.00	70.00	Cukup
104	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Provinsi	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.00	18.00	18.10	40.00	73.10	Baik
105	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi	10.00	5.00	5.00	3.61	1.00	4.72	29.10	40.00	40.00	95.45	Sangat Baik
106	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	10.00	5.00	3.87	2.96	1.00	4.94	27.77	24.51	40.00	92.29	Sangat Baik
107	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	10.00	4.97	2.72	2.97	1.00	3.89	25.55	26.37	40.00	91.92	Sangat Baik
108	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi	10.00	5.00	0.00	2.36	1.00	3.00	21.44	23.62	40.00	85.06	Baik
109	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	10.00	4.93	0.00	3.75	1.00	4.04	23.75	30.00	40.00	93.75	Sangat Baik
110	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	10.00	5.00	3.00	2.09	1.00	4.00	25.17	21.75	40.00	86.92	Baik
111	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	10.00	5.00	3.60	2.56	1.00	4.40	26.63	22.84	40.00	89.57	Baik
112	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi	9.62	4.67	0.00	2.54	1.00	4.17	22.00	30.00	40.00	92.00	Sangat Baik
113	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	10.00	5.00	2.71	2.87	1.00	4.52	25.90	22.67	40.00	88.57	Baik
114	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	10.00	5.00	3.52	3.63	1.00	4.06	26.41	26.09	40.00	92.70	Sangat Baik
115	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Provinsi	10.00	5.00	0.00	2.44	1.00	4.84	23.08	17.25	40.00	80.33	Baik
116	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Provinsi	10.00	4.76	2.87	0.60	1.00	4.53	21.13	20.83	40.00	83.96	Baik
117	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Provinsi	7.18	4.78	3.94	2.88	1.00	4.34	24.84	19.33	40.00	83.17	Baik
118	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi	10.00	4.52	3.70	0.00	1.00	4.19	21.41	22.65	40.00	86.06	Baik
119	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi	7.81	4.52	3.64	0.00	1.00	4.24	21.21	21.00	40.00	82.21	Baik
120	Pemerintah Daerah Provinsi Papua	Provinsi	8.88	4.77	0.00	0.00	1.00	3.46	17.09	19.32	40.00	76.41	Baik
121	Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat	Provinsi	3.22	4.49	0.00	0.00	1.00	4.16	14.87	0.00	35.56	50.43	Cukup
122	Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi	6.92	5.00	0.00	0.00	1.00	4.20	17.20	18.48	40.00	79.68	Baik
123	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi	9.99	5.00	2.75	0.60	1.00	4.39	24.13	24.13	40.00	82.12	Baik
124	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	9.92	5.00	2.80	0.00	1.00	4.24	22.96	28.04	40.00	91.00	Sangat Baik
125	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi	10.00	3.78	3.84	0.00	1.00	4.29	22.89	18.00	40.00	80.89	Baik
126	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi	10.00	4.95	4.30	0.00	1.00	4.67	24.92	27.69	40.00	92.61	Sangat Baik
127	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi	10.00	5.00	3.13	0.00	1.00	4.17	23.32	20.91	40.00	84.23	Baik
128	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	10.00	5.00	4.21	2.35	1.00	4.72	27.28	26.67	40.00	94.15	Sangat Baik
129	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.90	19.90	21.29	40.00	81.19	Baik
130	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.09	20.09	22.38	40.00	82.47	Baik
131	Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi	0.00	4.82	3.82	0.00	0.00	2.50	11.02	12.69	26.67	50.30	Cukup
132	Provinsi Papua Pegunungan	Provinsi	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	4.09	7.72	6.00	22.22	29.94	Kurang
133	Provinsi Papua Selatan	Provinsi	5.19	4.58	0.00	0.00	0.00	4.54	17.31	0.00	26.67	43.98	Kurang
134	Provinsi Papua Tengah	Provinsi	10.00	5.00	3.04	0.00	0.00	4.85	22.89	30.00	17.78	70.67	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemudahan UKPSI	Skor IKSP	Predikat
135	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten	3.22	4.88	3.68	0.00	0.00	4.44	18.20	3.21	35.56	58.97	Cukup
136	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten	10.00	2.95	0.00	0.00	0.00	4.50	17.45	13.64	35.56	66.65	Cukup
137	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	9.90	4.93	3.30	0.00	0.00	3.31	20.44	16.68	31.11	68.43	Baik
138	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten	7.31	4.97	4.10	0.00	0.00	3.77	20.15	16.68	40.00	77.03	Baik
139	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten	10.00	4.67	3.75	0.00	0.00	3.58	22.30	10.00	40.00	72.30	Baik
140	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten	0.00	5.00	3.97	0.00	0.00	3.86	12.43	7.50	31.11	51.04	Cukup
141	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten	10.00	5.00	2.66	0.00	0.00	4.06	21.72	18.73	40.00	80.47	Baik
142	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten	10.00	4.97	0.00	0.00	0.00	3.77	18.74	6.32	40.00	65.56	Cukup
143	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten	9.61	4.92	2.84	0.00	0.00	3.46	20.93	13.04	17.78	51.75	Cukup
144	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten	9.48	4.95	3.27	0.00	0.00	4.24	21.31	11.71	35.56	72.58	Baik
145	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten	10.00	5.00	3.43	0.00	0.00	4.75	23.18	14.43	35.56	73.18	Baik
146	Pemerintah Daerah Kabupaten Agam	Kabupaten	8.61	4.30	0.00	0.00	0.00	3.90	17.91	16.96	40.00	74.87	Baik
147	Pemerintah Daerah Kabupaten Alor	Kabupaten	0.00	4.99	3.30	0.00	0.00	4.87	13.16	22.50	22.22	57.88	Cukup
148	Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan	Kabupaten	10.00	4.87	2.92	0.00	0.00	4.13	21.92	13.76	40.00	68.18	Baik
149	Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat	Kabupaten	9.68	4.97	0.00	0.00	0.00	4.21	16.06	0.00	31.11	26.17	Kurang
150	Pemerintah Daerah Kabupaten Babelup	Kabupaten	10.00	4.77	2.89	3.55	1.00	4.20	26.49	18.18	40.00	84.67	Baik
151	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	Kabupaten	10.00	4.91	4.15	2.18	1.00	3.94	28.15	20.87	40.00	87.02	Baik
152	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten	10.00	4.84	3.59	0.00	1.00	4.70	24.13	13.00	40.00	79.13	Baik
153	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	Kabupaten	9.37	3.53	3.54	0.00	1.00	4.74	22.18	23.33	40.00	85.51	Baik
154	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tengah	Kabupaten	10.00	5.00	4.35	0.00	1.00	3.94	24.29	24.78	40.00	89.07	Baik
155	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Selatan	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	0.00	0.00	3.53	18.46	16.00	35.56	70.02	Baik
156	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tengah	Kabupaten	10.00	4.90	4.10	0.00	0.00	3.88	22.96	17.00	35.56	85.52	Baik
157	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Utara	Kabupaten	9.40	4.90	3.30	0.00	0.00	4.30	21.66	21.00	40.00	82.66	Baik
158	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Barat	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.12	20.12	25.71	40.00	85.83	Baik
159	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Selatan	Kabupaten	10.00	4.81	0.00	0.00	1.00	2.03	17.84	18.00	35.56	71.20	Baik
160	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tengah	Kabupaten	10.00	4.56	0.00	2.96	0.00	3.93	20.55	19.29	40.00	79.84	Baik
161	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangsawan	Kabupaten	9.21	4.63	2.66	0.00	1.00	4.91	22.83	9.90	40.00	71.63	Baik
162	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli	Kabupaten	10.00	5.00	3.70	3.33	1.00	4.93	27.96	19.57	40.00	87.53	Baik
163	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli	Kabupaten	10.00	5.00	3.90	2.47	1.00	4.72	26.72	10.00	40.00	87.12	Baik
164	Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarjengara	Kabupaten	10.00	5.00	2.91	2.50	0.00	4.33	24.74	15.00	35.56	75.30	Baik
165	Pemerintah Daerah Kabupaten Baris	Kabupaten	3.58	0.00	3.57	0.00	0.00	3.89	13.05	12.00	31.11	58.18	Cukup
166	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito	Kabupaten	9.99	5.00	3.02	2.57	1.00	4.97	26.56	10.77	40.00	87.33	Baik
167	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten	9.95	4.82	3.54	2.88	0.00	4.87	26.04	16.00	40.00	82.04	Baik
168	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten	10.00	4.78	0.00	3.62	1.00	4.89	23.29	20.00	35.56	78.85	Baik
169	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara	Kabupaten	10.00	4.50	4.69	3.74	1.00	4.87	28.79	20.00	40.00	88.79	Baik
170	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur	Kabupaten	10.00	5.00	4.34	3.62	1.00	4.16	27.51	23.08	40.00	90.59	Sangat Baik
171	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten	10.00	4.75	3.40	0.00	0.00	4.15	22.30	24.55	40.00	86.85	Baik
172	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur	Kabupaten	10.00	4.74	4.64	2.77	1.00	4.82	27.97	17.14	35.56	80.67	Baik
173	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara	Kabupaten	9.54	4.90	3.17	2.88	0.00	4.17	24.48	28.85	35.56	88.87	Baik
174	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten	9.95	4.90	3.33	0.00	1.00	3.56	22.85	15.88	35.56	74.29	Baik
175	Pemerintah Daerah Kabupaten Barung	Kabupaten	9.85	5.00	3.58	3.20	1.00	4.66	27.29	22.17	40.00	89.46	Baik
176	Pemerintah Daerah Kabupaten Barung	Kabupaten	10.00	5.00	2.59	0.00	1.00	4.00	20.90	10.91	40.00	71.89	Baik
177	Pemerintah Daerah Kabupaten Barung	Kabupaten	9.43	4.72	3.95	2.32	0.00	4.56	21.03	21.00	40.00	83.03	Baik
178	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	Kabupaten	10.00	5.00	3.95	0.00	1.00	4.43	24.38	18.00	40.00	82.38	Baik
179	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang	Kabupaten	9.45	4.88	2.87	2.44	0.00	4.88	24.30	11.47	40.00	75.77	Baik
180	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur	Kabupaten	9.92	4.75	3.97	3.63	0.00	4.33	25.99	22.50	40.00	88.49	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemampuan UKPBJ	Skor IKRP	Predikat
101	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu	Kabupaten	9.82	4.93	3.57	0.00	0.00	4.88	22.95	9.00	28.87	58.05	Cukup
102	Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah	Kabupaten	10.00	4.93	3.61	0.00	1.00	4.85	24.53	15.88	40.00	80.41	Baik
103	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	0.00	4.91	3.85	0.00	0.00	4.66	13.42	14.00	22.22	49.64	Kurang
104	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	Kabupaten	10.00	4.97	4.27	3.03	0.00	4.52	26.80	23.08	40.00	89.08	Baik
105	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten	7.53	5.00	3.23	0.00	0.00	4.63	20.61	12.27	35.56	68.44	Cukup
106	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten	10.00	5.00	4.01	2.44	0.00	2.88	24.33	22.00	35.56	81.09	Baik
107	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten	10.00	4.84	2.74	0.00	0.00	4.36	22.07	23.08	35.56	60.71	Baik
108	Pemerintah Daerah Kabupaten Berau	Kabupaten	10.00	5.00	3.19	0.00	0.00	3.54	21.53	18.68	40.00	79.99	Baik
109	Pemerintah Daerah Kabupaten Bika Nomor	Kabupaten	7.82	5.00	3.59	0.00	0.00	4.97	21.35	0.00	26.67	48.05	Kurang
190	Pemerintah Daerah Kabupaten Bima	Kabupaten	1.57	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	1.57	35.56	57.09	Cukup
191	Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	Kabupaten	10.00	4.97	2.99	2.53	0.00	4.36	24.45	18.28	40.00	83.11	Baik
192	Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen	Kabupaten	10.00	4.99	3.42	0.00	1.00	4.70	24.11	3.61	22.22	68.94	Kurang
193	Pemerintah Daerah Kabupaten Bitar	Kabupaten	10.00	5.00	3.64	0.00	1.00	4.45	24.09	22.76	40.00	68.85	Baik
194	Pemerintah Daerah Kabupaten Bora	Kabupaten	10.00	5.00	3.61	2.56	0.00	4.45	24.32	25.00	40.00	91.32	Sangat Baik
195	Pemerintah Daerah Kabupaten Bosmina	Kabupaten	9.09	4.90	2.97	0.00	1.00	3.93	21.88	24.00	35.56	81.44	Baik
196	Pemerintah Daerah Kabupaten Boga	Kabupaten	9.00	4.77	2.81	0.00	0.00	4.18	20.77	23.59	40.00	84.66	Baik
197	Pemerintah Daerah Kabupaten Rokrognom	Kabupaten	10.00	4.85	4.27	0.00	0.00	4.52	23.65	19.59	40.00	83.24	Baik
198	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolang Mongondow	Kabupaten	9.92	5.00	3.95	3.79	0.00	4.17	26.83	10.50	35.56	72.29	Baik
199	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.92	17.92	9.00	35.56	62.48	Cukup
200	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Timur	Kabupaten	10.00	4.87	3.30	0.00	0.00	3.50	21.47	16.37	35.56	73.40	Baik
201	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara	Kabupaten	10.00	5.00	3.72	0.00	0.00	3.95	22.67	18.00	40.00	80.67	Baik
202	Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana	Kabupaten	1.68	5.00	3.44	0.00	0.00	3.89	20.78	18.89	35.56	75.23	Baik
203	Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	10.00	3.83	2.95	0.00	0.00	3.88	15.00	14.00	40.00	71.46	Baik
204	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	Kabupaten	10.00	4.95	0.00	0.00	0.00	3.76	18.81	17.78	35.56	71.95	Baik
205	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.78	18.78	18.00	35.56	72.34	Baik
206	Pemerintah Daerah Kabupaten Bowen Digel	Kabupaten	10.00	4.68	0.00	0.00	0.00	1.62	16.48	6.00	22.22	44.70	Kurang
207	Pemerintah Daerah Kabupaten Boyali	Kabupaten	9.91	5.00	0.00	0.00	1.00	4.36	20.27	16.50	40.00	76.77	Baik
208	Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	Kabupaten	10.00	4.99	3.05	2.57	1.00	4.51	26.42	24.00	40.00	90.12	Sangat Baik
209	Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Kabupaten	10.00	4.96	0.00	2.68	0.00	4.48	24.96	24.96	40.00	87.26	Baik
210	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulelumbu	Kabupaten	10.00	5.00	2.57	0.00	1.00	4.31	22.88	12.27	13.33	48.48	Kurang
211	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan	Kabupaten	10.00	4.96	4.03	0.00	0.00	4.15	23.14	24.38	40.00	87.52	Baik
212	Pemerintah Daerah Kabupaten Burang	Kabupaten	10.00	4.86	3.29	2.54	1.00	4.19	24.00	17.31	40.00	83.31	Baik
213	Pemerintah Daerah Kabupaten Buro	Kabupaten	10.00	5.00	4.07	0.00	1.00	4.16	24.33	23.50	35.56	82.29	Baik
214	Pemerintah Daerah Kabupaten Buru	Kabupaten	6.39	4.27	4.17	0.00	0.00	3.19	18.02	9.38	4.44	31.84	Kurang
215	Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan	Kabupaten	0.00	5.00	4.25	0.00	0.00	4.36	13.61	7.83	4.44	25.00	Kurang
216	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2.42	22.42	11.67	40.00	74.09	Baik
217	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten	9.38	4.93	4.13	0.00	0.00	3.83	22.27	2.75	35.56	60.56	Cukup
218	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten	9.12	4.83	0.00	0.00	0.00	4.20	18.03	24.00	40.00	82.03	Baik
219	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara	Kabupaten	10.00	4.04	4.26	0.00	0.00	4.91	23.23	30.00	35.56	88.79	Baik
220	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	Kabupaten	10.00	5.00	4.57	3.52	1.00	4.45	24.54	21.00	40.00	89.54	Baik
221	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	Kabupaten	10.00	4.43	3.89	2.28	1.00	4.79	25.69	13.00	40.00	78.89	Baik
222	Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap	Kabupaten	10.00	5.00	3.61	3.15	1.00	4.54	27.07	17.99	40.00	84.76	Baik
223	Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	Kabupaten	7.43	4.92	2.53	0.00	1.00	4.56	20.44	22.86	40.00	83.30	Baik
224	Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi	Kabupaten	8.15	4.83	0.00	0.00	1.00	4.19	18.17	10.00	13.33	41.50	Kurang
225	Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten	10.00	4.28	0.00	0.00	0.00	5.00	19.28	0.00	31.11	50.39	Cukup
226	Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten	10.00	5.00	2.62	0.00	0.00	2.88	20.48	20.00	35.56	76.04	Baik
227	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	Kabupaten	10.00	5.00	4.43	2.54	1.00	4.60	27.65	13.85	40.00	81.50	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemampuan UKPBJ	Skor IKRP	Predikat	
228	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten	10.00	4.47	0.00	0.00	3.06	0.00	3.15	20.71	13.50	40.00	74.21	Baik
229	Pemerintah Daerah Kabupaten Digayil	Kabupaten	10.00	4.63	0.00	0.00	0.00	5.00	19.63	0.00	1.89	28.52	Kurang	
230	Pemerintah Daerah Kabupaten Dintora	Kabupaten	10.00	5.00	2.71	0.00	1.00	4.16	21.37	21.00	40.00	88.37	Baik	
231	Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	Kabupaten	8.95	3.00	2.95	0.00	0.00	3.82	20.72	21.13	35.56	77.46	Baik	
232	Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten	5.79	4.94	0.00	0.00	0.00	2.55	13.28	0.00	17.78	31.06	Kurang	
233	Pemerintah Daerah Kabupaten Ende	Kabupaten	10.00	4.33	0.00	0.00	0.00	4.13	18.46	18.59	17.78	46.13	Kurang	
234	Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	Kabupaten	10.00	5.00	3.92	0.00	1.00	3.77	23.69	10.91	35.56	70.16	Baik	
235	Pemerintah Daerah Kabupaten Falaah	Kabupaten	0.00	4.76	3.88	0.00	0.00	4.56	13.20	9.13	31.11	53.44	Cukup	
236	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Kabupaten	0.00	4.98	4.45	0.00	0.00	2.77	12.20	6.00	13.33	31.53	Kurang	
237	Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	Kabupaten	10.00	5.00	4.43	3.28	1.00	4.41	28.12	22.50	40.00	90.62	Sangat Baik	
238	Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	3.69	13.69	21.25	22.22	57.16	Cukup	
239	Pemerintah Daerah Kabupaten Giliyari	Kabupaten	10.00	5.00	3.55	3.50	1.00	4.83	27.88	30.00	40.00	97.08	Sangat Baik	
240	Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	Kabupaten	8.18	3.83	2.88	0.00	1.00	3.77	19.44	10.54	40.00	69.78	Cukup	
241	Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.24	19.24	12.88	35.56	67.66	Cukup	
242	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Kabupaten	10.00	4.16	3.71	3.75	1.00	3.88	26.50	16.07	35.56	78.13	Baik	
243	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Kabupaten	9.17	5.00	3.01	2.82	1.00	4.54	25.95	19.71	40.00	85.66	Baik	
244	Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan	Kabupaten	10.00	5.00	3.55	2.08	1.00	4.74	26.35	20.77	40.00	87.12	Baik	
245	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten	10.00	5.00	3.10	2.59	1.00	4.57	26.28	19.69	40.00	85.95	Baik	
246	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	3.10	1.00	4.22	23.32	12.50	35.56	71.38	Baik	
247	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Kabupaten	8.48	4.53	2.99	0.00	0.00	4.67	20.86	3.00	17.78	41.44	Kurang	
248	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten	10.00	4.40	3.89	2.59	0.00	4.87	25.42	6.21	35.56	67.19	Cukup	
249	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten	8.89	3.91	0.00	0.00	0.00	3.57	16.37	8.00	22.22	48.59	Kurang	
250	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur	Kabupaten	9.87	4.96	3.21	0.00	0.00	4.82	22.85	10.00	35.56	68.41	Cukup	
251	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	2.44	6.65	2.14	28.87	35.46	Kurang	
252	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	3.51	1.00	4.89	29.43	22.00	40.00	82.23	Sangat Baik	
253	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten	10.00	4.72	0.00	0.00	0.00	2.84	17.65	20.87	40.00	78.52	Baik	
254	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten	10.00	4.79	4.12	3.90	1.00	4.82	28.82	18.26	40.00	86.88	Baik	
255	Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten	9.37	4.83	4.33	0.00	0.00	4.11	22.69	8.89	35.56	67.14	Cukup	
256	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten	10.00	3.48	2.74	0.00	1.00	4.45	21.67	7.78	40.00	69.45	Cukup	
257	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten	9.47	4.96	3.29	0.00	1.00	4.79	23.51	9.55	40.00	73.06	Baik	
258	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri	Kabupaten	0.00	5.00	4.44	0.00	0.00	3.90	13.34	13.04	40.00	66.58	Cukup	
259	Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya	Kabupaten	10.00	5.00	2.88	0.00	0.00	4.42	22.50	0.00	31.11	53.61	Cukup	
260	Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura	Kabupaten	9.93	5.00	5.00	0.00	0.00	4.46	24.39	0.00	35.56	59.95	Cukup	
261	Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten	5.79	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.79	0.00	4.44	15.23	Kurang	
262	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Kabupaten	9.92	5.00	0.00	0.00	1.00	4.52	19.44	21.60	40.00	80.04	Baik	
263	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Kabupaten	10.00	4.71	2.84	2.48	1.00	4.63	25.84	30.00	40.00	95.84	Sangat Baik	
264	Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto	Kabupaten	10.00	4.90	2.92	0.00	1.00	3.86	21.48	10.59	17.78	50.05	Cukup	
265	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Kabupaten	10.00	5.00	4.51	0.00	1.00	4.93	25.48	19.00	40.00	84.44	Baik	
266	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Kabupaten	10.00	4.48	4.56	2.59	0.00	4.35	24.87	14.00	40.00	80.13	Baik	
267	Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	Kabupaten	0.00	4.91	4.82	0.00	0.00	4.24	13.37	0.00	13.33	26.70	Kurang	
268	Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	Kabupaten	9.62	4.59	4.10	0.00	1.00	3.59	22.90	14.06	35.56	72.52	Baik	
269	Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas	Kabupaten	10.00	4.61	3.35	0.00	0.00	4.34	22.30	9.55	35.56	67.41	Cukup	
270	Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten	10.00	5.00	3.91	0.00	0.00	4.77	23.68	18.95	35.56	78.19	Baik	
271	Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar	Kabupaten	10.00	5.00										

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemampuan UKPBJ	Skor IKP	Predikat
272	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,86	2,96	3,65	1,00	4,94	27,42	9,55	40,00	76,97	Baik
273	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	2,72	3,20	1,00	4,32	26,33	26,36	40,00	62,69	Sangat Baik
274	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,41	0,00	0,00	4,44	22,35	23,43	40,00	66,33	Baik
275	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,53	4,75	0,00	0,00	0,00	3,80	16,69	3,72	35,56	57,37	Cukup
276	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	2,91	2,15	1,00	4,22	25,49	22,64	40,00	69,43	Baik
277	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,61	5,00	4,13	3,05	0,00	3,51	23,30	0,00	17,78	41,00	Kurang
278	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,64	2,73	0,00	0,00	4,56	21,95	30,00	35,56	67,51	Baik
279	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	3,00	3,13	3,23	0,00	4,61	25,97	18,19	40,00	64,36	Baik
280	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	2,67	2,48	1,00	4,62	25,77	15,37	35,56	76,70	Baik
281	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	5,33	4,70	0,00	0,00	0,00	4,00	14,03	0,00	13,33	27,35	Kurang
282	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,90	0,00	0,00	1,00	4,66	20,56	22,84	40,00	63,52	Baik
283	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,97	18,97	1,00	25,67	49,64	Kurang
284	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	3,82	2,65	2,70	1,00	4,55	24,72	26,00	40,00	90,72	Sangat Baik
285	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,18	2,64	0,00	0,00	4,23	21,05	21,00	31,11	73,16	Baik
286	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,13	0,00	0,00	4,73	22,86	10,43	40,00	73,29	Baik
287	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	2,97	0,00	3,45	21,42	6,92	40,00	68,34	Cukup
288	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,89	2,78	0,00	0,00	3,94	21,62	20,63	35,56	77,11	Baik
289	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,91	3,33	0,00	1,00	4,11	23,35	17,50	17,78	58,63	Cukup
290	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,73	4,60	2,99	2,97	0,00	4,74	25,05	10,91	35,56	71,52	Baik
291	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	0,00	5,00	4,67	0,00	1,00	5,00	15,67	0,00	4,44	20,11	Kurang
292	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,52	5,00	5,00	2,13	0,00	4,94	24,59	0,00	31,11	55,70	Cukup
293	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,45	5,00	3,22	0,00	0,00	4,18	20,85	18,00	31,11	69,96	Cukup
294	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,74	4,52	0,00	0,00	3,40	22,72	0,00	31,11	53,83	Cukup
295	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,25	4,84	4,82	0,00	1,00	4,84	22,45	10,00	40,00	72,45	Baik
296	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,52	4,42	3,61	1,00	4,69	22,56	17,42	40,00	65,92	Baik
297	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,90	3,48	0,00	1,00	3,60	22,96	4,44	35,56	62,96	Cukup
298	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	4,18	3,93	1,00	5,00	29,09	26,76	40,00	95,85	Sangat Baik
299	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,99	4,09	0,00	0,00	4,96	24,03	16,37	35,56	75,96	Baik
300	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,45	5,00	3,20	0,00	0,00	3,31	20,96	15,00	35,56	71,52	Baik
301	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,88	2,68	0,00	0,00	4,36	21,87	27,27	35,56	84,70	Baik
302	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,58	4,98	0,00	0,00	1,00	4,36	17,92	11,25	35,56	64,73	Cukup
303	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,51	5,00	0,00	0,00	0,00	4,78	18,27	15,68	40,00	74,15	Baik
304	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,09	4,75	0,00	0,00	1,00	4,08	16,87	24,00	40,00	80,17	Baik
305	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	3,75	0,00	0,00	0,00	4,23	17,96	21,82	35,56	75,36	Baik
306	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,67	3,15	2,48	1,00	3,43	24,69	22,22	40,00	66,91	Baik
307	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,95	2,71	1,00	4,81	27,27	23,00	40,00	90,27	Sangat Baik
308	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,56	2,91	3,58	1,00	4,70	26,75	25,20	40,00	91,95	Sangat Baik
309	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	0,00	5,00	4,61	0,00	1,00	4,85	15,46	11,05	31,11	57,62	Cukup
310	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,85	4,71	0,00	2,42	1,00	3,30	22,36	27,50	40,00	69,06	Baik
311	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,89	2,27	1,00	4,57	26,73	22,50	40,00	69,13	Baik
312	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,99	5,00	0,00	2,09	1,00	4,52	22,60	23,75	40,00	66,15	Baik
313	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	3,80	2,84	0,00	1,00	4,99	22,63	20,77	40,00	63,40	Baik
314	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,04	4,78	4,09	0,00	0,00	3,99	21,50	21,00	40,00	62,90	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemampuan UKPBJ	Skor IKP	Predikat
315	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,77	4,72	0,00	0,00	1,00	3,29	16,78	24,20	35,56	76,54	Baik
316	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,91	4,59	2,50	1,00	4,34	27,34	13,67	40,00	81,01	Baik
317	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,61	4,44	0,00	0,00	0,00	4,02	17,07	20,00	40,00	77,07	Baik
318	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,20	4,89	3,10	0,00	0,00	4,95	22,14	8,00	13,33	43,47	Kurang
319	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,96	2,78	0,00	0,00	4,77	22,53	15,88	35,56	73,97	Baik
320	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,90	5,00	3,88	2,27	0,00	4,00	24,03	11,54	40,00	75,57	Baik
321	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	5,98	4,94	4,57	0,00	0,00	3,79	19,23	13,33	35,56	68,17	Cukup
322	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,86	2,75	1,00	4,77	27,60	16,90	40,00	63,40	Baik
323	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,90	4,67	3,76	3,18	1,00	4,65	27,17	10,91	31,11	69,18	Cukup
324	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,99	5,00	3,97	0,00	1,00	2,71	22,67	21,11	35,56	79,34	Baik
325	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	4,53	3,70	1,00	4,92	29,15	24,00	40,00	93,15	Sangat Baik
326	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,55	5,00	0,00	3,47	1,00	3,47	22,49	26,90	40,00	69,19	Baik
327	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,94	0,00	0,00	0,00	3,73	18,67	12,00	28,67	57,34	Cukup
328	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,98	4,54	3,43	3,82	0,00	4,89	26,77	14,21	35,56	76,54	Baik
329	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,84	4,18	2,46	1,00	4,70	27,18	22,17	40,00	69,15	Baik
330	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,06	4,95	3,43	0,00	0,00	3,47	16,90	22,17	31,11	73,10	Baik
331	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	13,33	28,33	Kurang
332	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,76	0,00	1,00	4,42	24,18	22,80	40,00	66,96	Baik
333	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	4,79	0,00	0,00	4,94	24,73	6,32	23,67	57,72	Cukup
334	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,84	5,00	0,00	0,00	4,97	24,81	15,00	22,22	62,03	Cukup
335	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,57	0,00	4,04	0,00	0,00	4,81	16,42	21,40	40,00	78,02	Baik
336	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,35	0,60	1,00	4,75	24,19	13,85	40,00	77,95	Baik
337	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	4,94	3,95	1,00	4,84	29,73	15,93	40,00	83,66	Baik
338	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	0,00	1,00	3,38	19,27	15,00	40,00	74,27	Baik
339	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,64	4,81	0,00	0,00	0,00	3,03	17,42	6,21	40,00	63,69	Cukup
340	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	1,00	2,20	18,20	9,47	31,11	58,76	Cukup
341	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,43	3,01	2,71	1,00	4,66	26,01	6,67	35,56	66,24	Cukup
342	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	6,24	5,00	3,33	0,00	1,00	4,05	18,62	21,62	35,56	77,00	Baik
343	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,33	2,11	1,00	4,23	25,67	26,40	35,56	67,63	Baik
344	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	7,99	4,18	0,00	0,00	0,00	3,70	15,81	14,12	23,67	56,60	Cukup
345	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,96	2,60	1,00	4,66	27,42	16,98	40,00	64,30	Baik
346	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	3,96	3,63	1,00	4,74	26,33	21,11	40,00	69,44	Baik
347	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,28	3,84	3,24	1,00	4,63	26,99	23,23	40,00	90,22	Sangat Baik
348	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,09	18,44	5,00	35,56	59,04	Cukup
349	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	4,29	3,02	1,00	4,59	27,90	21,54	40,00	69,44	Baik
350	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	0,00	4,66	3,74	0,00	0,00	3,71	12,31	27,00	22,72	61,53	Cukup
351	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	1,00	41,42	Kurang
352	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	5,00	4,34	2,99	1,00	4,90	28,22	14,18	40,00	62,40	Baik
353	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,80	3,71	3,03	0,00	4,56	26,19	16,88	35,56	76,54	Baik
354	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	9,70	4,72	0,00	0,00	0,00	3,00	17,50	0,00	22,22	39,72	Kurang
355	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,36	0,00	0,00	1,00	3,57	18,93	1,82	35,56	56,31	Cukup
356	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,20	4,75	0,00	0,00	0,00	2,23	15,18	16,00	35,56	66,74	Cukup
357	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	8,35	4,67	0,00	0,00	0,00	3,70	15,92	2,50	17,78	36,20	Kurang
358	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	5,81	4,87	0,00	3,82	0,00	4,49	16,99	0,00	13,33	32,32	Kurang

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PDU	Indikator Tingkat Kemampuan UKPDU	Skor IKSP	Predikat
359	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah	Kabupaten	9.99	4.94	5.00	3.82	0.00	5.00	28.75	0.00	1.89	37.84	Kurang
360	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju	Kabupaten	10.00	4.83	2.76	0.00	0.00	3.66	21.25	21.00	35.56	77.61	Baik
361	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.33	19.33	6.00	35.56	61.09	Cukup
362	Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	6.97	4.66	3.30	0.00	0.00	4.27	19.40	10.00	26.67	64.07	Cukup
363	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	Kabupaten	10.00	4.88	3.43	0.00	1.00	4.90	24.21	22.98	31.11	78.18	Baik
364	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten	8.83	4.42	3.95	0.00	1.00	4.94	22.94	4.30	13.33	40.77	Kurang
365	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten	8.56	4.88	2.87	0.00	0.00	4.81	21.22	18.59	26.67	66.78	Cukup
366	Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	13.07	0.00	31.11	44.18	Kurang
367	Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	22.22	19.22	Kurang
368	Pemerintah Daerah Kabupaten Maggi	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.72	19.72	0.00	13.33	19.05	Kurang
369	Pemerintah Daerah Kabupaten Mima	Kabupaten	10.00	5.00	4.35	2.97	0.00	3.45	25.77	12.00	35.56	75.44	Baik
370	Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka	Kabupaten	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	4.09	9.77	0.00	0.00	9.77	Kurang
371	Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi	Kabupaten	10.00	4.99	0.00	2.30	0.00	3.19	20.48	12.00	35.56	66.04	Cukup
372	Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Kabupaten	10.00	4.59	4.50	2.34	1.00	3.93	26.34	16.99	35.56	60.05	Baik
373	Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Kabupaten	10.00	4.75	0.00	0.00	1.00	3.64	19.36	5.22	40.00	65.17	Cukup
374	Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke	Kabupaten	5.55	5.00	3.35	0.00	0.00	4.53	22.43	3.00	40.00	65.43	Cukup
375	Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji	Kabupaten	10.00	4.88	0.00	0.00	1.00	4.63	20.51	20.87	40.00	61.36	Baik
376	Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	Kabupaten	10.00	5.00	3.45	0.00	0.00	4.40	23.25	2.40	35.56	61.21	Cukup
377	Pemerintah Daerah Kabupaten Mirahara	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.32	18.32	21.82	35.56	75.70	Baik
378	Pemerintah Daerah Kabupaten Mirahara Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	3.67	0.00	0.00	4.05	22.72	9.23	40.00	71.95	Baik
379	Pemerintah Daerah Kabupaten Mirahara Tenggara	Kabupaten	10.00	4.86	2.70	0.00	0.00	4.17	21.73	13.64	40.00	75.37	Baik
380	Pemerintah Daerah Kabupaten Mirahara Utara	Kabupaten	9.81	5.00	0.00	3.48	1.00	4.15	23.42	27.50	40.00	90.92	Sangat Baik
381	Pemerintah Daerah Kabupaten Majoelena	Kabupaten	10.00	5.00	4.21	2.58	1.00	4.31	27.30	20.50	40.00	87.40	Baik
382	Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke	Kabupaten	10.00	5.00	3.63	0.00	0.00	3.09	21.66	13.50	40.00	74.16	Baik
383	Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	Kabupaten	9.26	4.59	3.79	0.00	1.00	4.24	22.85	20.00	40.00	82.85	Baik
384	Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim	Kabupaten	9.89	4.89	2.67	0.00	1.00	3.93	20.35	19.41	35.56	75.35	Baik
385	Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Jambi	Kabupaten	10.00	4.98	3.24	0.00	0.00	4.42	22.82	19.41	22.22	64.25	Cukup
386	Pemerintah Daerah Kabupaten Muko-Muko	Kabupaten	8.82	4.98	0.00	2.28	1.00	3.59	20.69	19.29	35.56	75.50	Baik
387	Pemerintah Daerah Kabupaten Muna	Kabupaten	10.00	4.27	2.90	0.00	0.00	1.34	18.21	10.20	40.00	68.21	Cukup
388	Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat	Kabupaten	8.21	4.97	3.53	3.58	0.00	4.79	25.08	30.00	35.56	90.62	Sangat Baik
389	Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya	Kabupaten	10.00	4.56	3.85	0.00	0.00	4.88	23.09	28.64	40.00	91.75	Sangat Baik
390	Pemerintah Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi	Kabupaten	10.00	4.77	4.06	0.00	1.00	4.07	23.90	28.38	40.00	92.28	Sangat Baik
391	Pemerintah Daerah Kabupaten Muli Rawas	Kabupaten	10.00	4.96	4.55	0.00	0.00	4.34	23.85	11.74	22.22	57.81	Cukup
392	Pemerintah Daerah Kabupaten Muli Rawas Utara	Kabupaten	10.00	4.82	0.00	0.00	0.00	4.22	19.04	9.68	40.00	66.72	Cukup
393	Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire	Kabupaten	0.00	4.97	4.24	0.00	0.00	4.75	13.96	0.00	31.11	45.07	Kurang
394	Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten	6.54	5.00	4.77	0.00	0.00	3.69	20.00	11.47	17.79	49.25	Kurang
395	Pemerintah Daerah Kabupaten Nagele	Kabupaten	10.00	4.88	0.00	2.08	0.00	4.78	21.72	19.41	40.00	81.13	Baik
396	Pemerintah Daerah Kabupaten Nalenda	Kabupaten	10.00	4.98	3.24	2.20	1.00	4.90	26.41	20.69	40.00	87.10	Baik
397	Pemerintah Daerah Kabupaten Nagele	Kabupaten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	Kurang
398	Pemerintah Daerah Kabupaten Nagele	Kabupaten	10.00	4.99	2.88	0.00	1.00	4.00	23.88	18.00	35.56	76.44	Baik
399	Pemerintah Daerah Kabupaten Ngatik	Kabupaten	10.00	5.00	3.98	0.00	0.00	4.02	22.98	20.40	40.00	83.38	Baik
400	Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada	Kabupaten	10.00	5.00	3.61	3.68	0.00	4.59	27.11	24.29	40.00	94.34	Sangat Baik
401	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.65	16.65	13.50	40.00	71.15	Baik
402	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat	Kabupaten	10.00	4.88	3.13	0.00	0.00	3.60	21.81	30.00	13.33	64.94	Cukup
403	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten	8.34	4.89	3.13	0.00	0.00	4.89	21.25	2.50	31.11	54.86	Cukup
404	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara	Kabupaten	9.36	4.99	4.18	0.00	0.00	3.57	22.10	6.92	17.79	46.00	Kurang
405	Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan	Kabupaten	10.00	5.00	3.52	0.00	1.00	4.32	23.84	16.67	40.00	80.51	Baik
406	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten	10.00	4.91	2.79	0.00	0.00	4.66	22.56	13.13	40.00	75.69	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PDU	Indikator Tingkat Kemampuan UKPDU	Skor IKSP	Predikat
407	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten	10.00	4.92	4.07	2.42	1.00	4.60	27.21	10.39	40.00	77.60	Baik
408	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten	6.76	4.67	3.84	0.00	0.00	4.21	19.48	20.45	40.00	79.93	Baik
409	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	3.05	0.00	0.00	4.02	22.07	4.61	35.56	62.24	Cukup
410	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kabupaten	10.00	4.89	4.30	0.00	0.00	4.71	23.90	13.55	35.56	79.01	Baik
411	Pemerintah Daerah Kabupaten Palotan	Kabupaten	10.00	5.00	4.71	3.63	0.00	4.45	27.18	15.65	40.00	82.83	Baik
412	Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten	7.39	5.00	0.00	0.00	0.00	3.71	16.10	8.00	26.67	50.77	Cukup
413	Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	13.33	18.21	Kurang
414	Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten	7.45	5.00	0.00	0.00	0.00	2.93	15.38	14.29	40.00	69.67	Cukup
415	Pemerintah Daerah Kabupaten Paloh-Bharu	Kabupaten	10.00	4.91	3.68	3.10	1.00	4.07	26.76	11.25	17.79	55.79	Cukup
416	Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan	Kabupaten	9.99	4.28	2.95	0.00	0.00	4.95	22.15	14.43	40.00	76.80	Baik
417	Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	0.00	0.00	3.00	14.93	24.71	40.00	79.64	Baik
418	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	Kabupaten	10.00	4.41	2.73	3.63	0.00	4.37	24.54	21.00	40.00	85.54	Baik
419	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangajene & Kepulauan	Kabupaten	6.69	5.00	3.16	0.00	1.00	4.85	20.50	20.00	35.56	76.06	Baik
420	Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai	Kabupaten	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	1.89	18.21	Kurang
421	Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten	10.00	4.92	0.00	0.00	1.00	4.89	20.81	4.29	35.56	60.66	Cukup
422	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman	Kabupaten	10.00	3.92	3.34	0.00	0.00	4.51	21.97	27.00	40.00	88.97	Baik
423	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	4.28	8.95	7.90	35.56	52.41	Cukup
424	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir Pengaraian	Kabupaten	6.68	4.96	3.08	0.00	0.00	4.47	19.11	12.00	36.87	57.78	Cukup
425	Pemerintah Daerah Kabupaten Paser	Kabupaten	9.63	4.73	2.52	0.00	0.00	4.19	21.07	14.29	40.00	78.36	Baik
426	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan	Kabupaten	10.00	5.00	3.89	3.47	1.00	4.62	27.90	17.50	40.00	85.34	Baik
427	Pemerintah Daerah Kabupaten Pati	Kabupaten	10.00	5.00	4.19	2.78	0.00	4.46	26.43	17.50	40.00	83.93	Baik
428	Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Jati	Kabupaten	9.19	4.63	3.52	0.00	0.00	4.08	21.42	0.00	26.67	48.09	Kurang
429	Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang	Kabupaten	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	17.00	0.00	17.79	14.78	Kurang
430	Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalangan	Kabupaten	10.00	4.96	2.66	0.00	1.00	4.31	22.93	15.52	40.00	78.05	Baik
431	Pemerintah Daerah Kabupaten Pelaiwang	Kabupaten	10.00	3.64	0.00	0.00	1.00	3.76	16.62	4.29	35.56	58.17	Cukup
432	Pemerintah Daerah Kabupaten Pemangaja	Kabupaten	10.00	5.00	3.93	3.29	1.00	4.00	26.82	22.50	40.00	89.32	Baik
433	Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten	9.50	5.00	2.92	2.83	1.00	3.28	24.53	7.83	35.56	67.92	Cukup
434	Pemerintah Daerah Kabupaten Penulih Abad Lemgang Ilir	Kabupaten	10.00	4.46	4.39	0.00	1.00	3.19	23.05	16.80	40.00	79.85	Baik
435	Pemerintah Daerah Kabupaten Perawang	Kabupaten	10.00	4.92	0.00	0.00	1.00	4.89	20.81	20.53	35.56	76.90	Baik
436	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	Kabupaten	9.96	4.88	0.00	0.00	0.00	4.08	16.92	4.29	22.22	45.43	Kurang
437	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	3.71	0.00	0.00	4.30	23.01	16.50	40.00	79.51	Baik
438	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir	Kabupaten	10.00	4.77	5.00	2.28	0.00	4.88	26.84	15.71	35.56	78.21	Baik
439	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Jaya	Kabupaten	10.00	2.89	4.54	0.00	0.00	3.79	20.45	8.12	36.67	56.14	Cukup
440	Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo	Kabupaten	10.00	4.97	3.58	0.00	0.00	4.33	22.88	13.64	35.56	72.08	Baik
441	Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato	Kabupaten	10.00	5.00	2.57	2.64	0.00	3.81	24.02	8.33	35.56	67.91	Cukup
442	Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten	10.00	4.10	0.00	0.00	0.00	3.66	17.76	14.52	40.00	72.28	Baik
443	Pemerintah Daerah Kabupaten Ponogo	Kabupaten	9.99	4.53	0.00	2.61	1.00	4.39	22.82	13.55	35.56	72.23	Baik
444	Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	Kabupaten	5.72	4.88	4.02	0.00	0.00	4.95	19.57	13.50	40.00	73.07	Baik
445	Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	Kabupaten	10.00	4.88	3.44	2.29	0.00	3.97	24.38	23.91	40.00	90.27	Sangat Baik
446	Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	10.00	4.89	3.14	2.15	1.00	4.67	25.59	15.59	35.56	84.94	Baik
447	Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten	7.66	5.00	4.39	0.00	0.00	4.34	21.39	15.00	35.56	71.95	Baik
448	Pemerintah Daerah Kabupaten Puluwari	Kabupaten	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	4.93	13.93	1.76	35.56	51.25	Cukup
449	Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak												

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM FBI	Indikator Tingkat Kemampuan UKPFI	Skor IKIP	Predikat
450	Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya	Kabupaten	10.00	5.00	4.47	0.00	0.00	5.00	24.47	9.00	31.11	55.58	Cukup
451	Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga	Kabupaten	10.00	5.00	4.55	3.03	1.00	4.51	25.09	8.89	40.00	76.90	Baik
452	Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	Kabupaten	8.21	4.16	3.72	2.74	1.00	4.67	24.50	16.67	40.00	81.17	Baik
453	Pemerintah Daerah Kabupaten Puncung	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.26	0.00	4.80	21.86	14.40	35.56	71.02	Baik
454	Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4.99	14.89	0.00	35.56	50.45	Cukup
455	Pemerintah Daerah Kabupaten Rajang Lebong	Kabupaten	7.48	4.96	3.74	0.00	0.00	5.75	18.91	9.00	35.56	57.47	Cukup
456	Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang	Kabupaten	10.00	4.93	2.82	0.00	1.00	4.11	23.36	21.25	40.00	84.61	Baik
457	Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten	7.23	4.71	4.42	0.00	0.00	4.99	21.31	7.00	35.56	63.05	Cukup
458	Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten	6.63	5.00	0.00	0.00	1.00	4.12	19.75	23.50	35.56	77.01	Baik
459	Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten	9.18	4.97	0.00	0.00	0.00	3.82	17.97	8.82	13.33	40.12	Kurang
460	Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.52	20.52	0.00	22.22	42.74	Kurang
461	Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.25	19.25	16.50	35.56	71.31	Baik
462	Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau	Kabupaten	10.00	4.97	3.15	0.00	1.00	2.82	22.00	17.65	31.11	70.76	Baik
463	Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	Kabupaten	10.00	5.00	3.80	0.00	0.00	4.40	23.20	8.00	35.56	66.04	Cukup
464	Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	2.53	1.00	4.17	27.70	22.26	40.00	89.96	Baik
465	Pemerintah Daerah Kabupaten Sarulla	Kabupaten	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	2.62	7.89	0.00	4.44	11.84	Kurang
466	Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun	Kabupaten	10.00	4.94	5.00	0.00	1.00	4.99	25.93	24.44	40.00	90.57	Sangat Baik
467	Pemerintah Daerah Kabupaten Sekeloa	Kabupaten	9.36	5.00	5.00	3.68	0.00	2.96	25.40	21.43	40.00	86.83	Baik
468	Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma	Kabupaten	10.00	4.95	4.29	0.00	0.00	3.79	23.00	12.84	40.00	75.86	Baik
469	Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang	Kabupaten	10.00	5.00	3.21	3.21	1.00	4.82	27.34	23.60	40.00	88.84	Baik
470	Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat	Kabupaten	6.25	4.61	3.11	0.00	0.00	4.81	20.58	8.40	35.56	64.54	Cukup
471	Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	Kabupaten	9.99	4.87	3.58	0.00	0.00	2.87	21.11	30.00	35.56	86.67	Baik
472	Pemerintah Daerah Kabupaten Serang	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	3.78	1.00	4.00	29.56	27.84	40.00	87.42	Sangat Baik
473	Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten	9.16	5.00	2.68	5.16	1.00	4.87	25.67	13.04	40.00	78.71	Baik
474	Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan	Kabupaten	10.00	4.15	3.87	0.00	0.00	4.56	23.57	10.50	35.56	68.83	Cukup
475	Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.10	1.00	3.87	21.97	26.36	40.00	85.33	Baik
476	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten	10.00	4.95	3.23	0.00	1.00	4.93	24.11	10.53	35.56	60.20	Baik
477	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap	Kabupaten	10.00	5.00	3.56	2.68	1.00	4.94	27.18	18.71	35.56	82.45	Baik
478	Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	Kabupaten	10.00	5.00	3.86	0.00	1.00	4.30	23.74	25.00	26.67	75.42	Baik
479	Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung	Kabupaten	10.00	5.00	4.57	0.00	0.00	4.03	23.40	15.79	35.56	74.95	Baik
480	Pemerintah Daerah Kabupaten Sika	Kabupaten	10.00	4.96	3.70	0.00	0.00	4.89	23.57	26.25	40.00	89.02	Baik
481	Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun	Kabupaten	7.32	5.00	0.00	0.00	0.00	3.43	18.72	18.64	35.56	60.92	Baik
482	Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun	Kabupaten	5.44	4.87	0.00	0.00	1.00	3.87	16.18	4.81	26.67	49.46	Kurang
483	Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun	Kabupaten	9.74	5.00	3.00	0.00	0.00	4.13	21.87	7.69	35.56	65.12	Cukup
484	Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.10	0.00	4.83	22.11	30.00	35.56	87.07	Baik
485	Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Kabupaten	10.00	5.00	3.54	3.17	1.00	4.96	27.49	12.00	40.00	78.49	Baik
486	Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Kabupaten	10.00	4.93	3.52	0.00	1.00	4.25	24.30	19.59	40.00	83.09	Baik
487	Pemerintah Daerah Kabupaten Solik	Kabupaten	9.39	5.00	4.54	0.00	0.00	4.43	23.36	9.35	40.00	72.91	Baik
488	Pemerintah Daerah Kabupaten Solik Selatan	Kabupaten	6.24	4.90	3.80	2.80	1.00	4.31	23.04	20.00	40.00	83.04	Baik
489	Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	Kabupaten	10.00	4.88	0.00	0.00	0.00	3.23	18.11	21.00	40.00	79.11	Baik
490	Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong	Kabupaten	0.00	4.93	4.21	0.00	0.00	3.45	12.59	0.00	35.56	48.15	Kurang
491	Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	Kurang
492	Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen	Kabupaten	10.00	5.00	2.51	0.00	0.00	4.70	22.30	26.20	40.00	88.70	Baik
493	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten	7.30	4.97	4.38	2.88	1.00	4.35	24.96	25.46	40.00	90.44	Sangat Baik
494	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten	7.96	4.79	3.96	0.00	1.00	4.89	22.20	19.74	40.00	81.94	Baik
495	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten	10.00	4.97	3.76	2.32	0.00	4.14	25.83	13.33	35.56	72.32	Baik
496	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten	10.00	5.00	2.55	3.29	0.00	4.47	25.31	16.46	40.00	81.47	Baik
497	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten	10.00	4.93	2.89	0.00	0.00	4.25	22.07	0.00	22.22	44.29	Kurang
498	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya	Kabupaten	6.85	4.83	0.00	0.00	0.00	4.90	16.58	24.00	22.22	62.80	Cukup
499	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah	Kabupaten	6.50	5.00	3.77	0.00	0.00	4.66	20.61	0.00	15.53	15.34	Kurang
500	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	2.17	7.06	12.00	26.67	45.73	Kurang
501	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa	Kabupaten	8.70	4.69	2.68	0.00	0.00	3.37	19.44	30.00	40.00	69.44	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM FBI	Indikator Tingkat Kemampuan UKPFI	Skor IKIP	Predikat
502	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten	8.38	4.93	0.00	0.00	0.00	4.12	17.43	16.80	35.56	69.79	Cukup
503	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	Kabupaten	10.00	5.00	3.95	0.00	1.00	4.99	24.84	18.00	40.00	82.84	Baik
504	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	Kabupaten	10.00	5.00	2.80	2.83	1.00	4.12	21.85	9.55	40.00	74.50	Baik
505	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	Kabupaten	0.00	4.72	4.59	0.00	0.00	4.87	14.18	0.00	13.33	27.51	Kurang
506	Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong	Kabupaten	10.00	4.87	3.85	3.33	1.00	4.00	27.85	23.33	40.00	91.18	Sangat Baik
507	Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	Kabupaten	10.00	5.00	4.52	3.71	1.00	4.11	28.34	26.90	40.00	95.24	Sangat Baik
508	Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	Kabupaten	9.90	5.00	5.00	0.00	1.00	4.15	25.05	9.58	31.11	65.54	Cukup
509	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	Kabupaten	8.70	4.51	4.25	0.00	0.00	4.93	19.29	11.05	35.56	65.20	Cukup
510	Pemerintah Daerah Kabupaten Tambora	Kabupaten	0.00	5.00	4.20	0.00	0.00	3.84	13.04	0.00	0.00	13.04	Kurang
511	Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.83	18.85	15.00	35.56	69.49	Cukup
512	Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	2.78	18.78	9.00	17.78	45.56	Kurang
513	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.30	0.00	4.48	21.78	25.54	40.00	87.34	Baik
514	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten	10.00	4.86	0.00	0.00	0.00	4.45	19.31	18.33	40.00	77.64	Baik
515	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten	10.00	5.00	3.32	2.51	1.00	3.97	25.80	21.92	40.00	87.72	Baik
516	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggar	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.84	19.84	30.00	40.00	89.04	Baik
517	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	Kabupaten	10.00	4.76	0.00	0.00	0.00	3.83	15.69	6.67	26.67	52.03	Cukup
518	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten	10.00	4.67	5.00	0.00	1.00	4.14	24.11	21.11	31.11	61.92	Cukup
519	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten	10.00	5.00	4.53	3.79	1.00	4.13	28.46	15.52	40.00	83.98	Baik
520	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten	8.97	4.87	3.99	2.02	0.00	4.01	23.86	8.57	8.89	41.32	Kurang
521	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	2.16	0.00	2.11	19.40	12.50	17.78	49.68	Kurang
522	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	0.00	1.00	4.96	20.89	4.29	22.22	47.40	Kurang
523	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Kabupaten	10.00	4.40	0.00	2.75	1.00	4.85	23.00	23.18	40.00	86.18	Baik
524	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten	8.91	4.86	3.73	0.00	1.00	4.68	21.30	7.50	40.00	68.00	Cukup
525	Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo	Kabupaten	10.00	4.99	4.63	0.00	1.00	4.44	25.06	15.65	31.11	71.82	Baik
526	Pemerintah Daerah Kabupaten Tagal	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.28	20.28	30.00	40.00	80.28	Baik
527	Pemerintah Daerah Kabupaten Takli Bintuni	Kabupaten	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.85	8.65	0.00	26.67	35.32	Kurang
528	Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama	Kabupaten	0.00	4.62	4.11	0.00	0.00	4.99	13.72	0.00	26.67	40.39	Kurang
529	Pemerintah Daerah Kabupaten Tembung	Kabupaten	10.00	5.00	4.20	3.14	1.00	4.75	28.09	22.80	40.00	90.89	Sangat Baik
530	Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten	6.25	4.99	0.00	0.00	1.00	2.55	14.79	19.09	35.56	69.44	Cukup
531	Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten	10.00	4.95	4.96	0.00	0.00	3.86	23.79	13.00	35.56	74.35	Baik
532	Pemerintah Daerah Kabupaten Tobo	Kabupaten	10.00	4.92	0.00	0.00	0.00	3.79	16.71	5.45	13.33	37.50	Kurang
533	Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Kabupaten	10.00	5.00	4.16	0.00	1.00	3.85	24.01	23.06	40.00	87.09	Baik
534	Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli	Kabupaten	10.00	4.95	3.84	0.00	0.00	4.33	23.62	15.00	40.00	76.62	Baik
535	Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara	Kabupaten	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	5.00	7.68	0.00	4.44	12.12	Kurang
536	Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten	10.00	4.94	3.11	0.00	1.00	4.01	23.06	15.00	35.56	75.62	Baik
537	Pemerintah Daerah Kabupaten Tenagapala	Kabupaten	10.00	5.00	3.97	3.31	1.00	4.62	27.50	13.00	40.00	82.50	Baik
538	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang	Kabupaten	10.00	4.93	3.23	0.00	1.00	4.44	23.60	22.84	40.00	86.46	Baik
539	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	18.75	40.00	78.75	Baik
540	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten	10.00	4.92	0.00								

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemampuan URPSU	Skor IKRP	Predikat	
548	Pemerintah Daerah Kabupaten Wanagiri	Kabupaten	10.00	4.50	0.00	2.41	1.00	4.77	23.19	17.42	40.00	60.50	Baik	
547	Pemerintah Daerah Kabupaten Wonorejo	Kabupaten	10.00	4.62	2.51	0.00	1.00	4.55	23.36	15.20	40.00	55.56	Baik	
548	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung	Kabupaten	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4.44	14.44	Kurang	
549	Pemerintah Daerah Kabupaten Talang	Kabupaten	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.54	0.00	0.00	12.54	Kurang	
550	Pemerintah Daerah Kota Amboi	Kota	10.00	4.73	4.05	0.00	0.00	3.53	23.29	30.00	40.00	92.29	Sangat Baik	
551	Pemerintah Daerah Kota Balikpapan	Kota	10.00	4.96	3.65	0.00	0.00	4.40	23.24	14.63	40.00	77.28	Baik	
552	Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.02	19.02	10.43	40.00	69.45	Cukup	
553	Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	Kota	8.60	5.00	2.94	0.00	1.00	4.07	22.81	6.32	40.00	68.93	Cukup	
554	Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung	Kota	10.00	4.82	3.50	2.25	1.00	4.80	26.17	18.84	40.00	55.01	Baik	
555	Pemerintah Daerah Kota Banjar	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.59	20.59	20.00	40.00	30.59	Baik	
556	Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Kota	10.00	4.98	4.03	3.25	0.00	4.63	26.89	15.65	40.00	62.34	Baik	
557	Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin	Kota	10.00	5.00	4.11	2.88	1.00	4.52	27.89	15.16	40.00	91.07	Sangat Baik	
558	Pemerintah Daerah Kota Batam	Kota	10.00	5.00	3.64	2.67	1.00	4.74	27.05	24.75	40.00	88.80	Baik	
559	Pemerintah Daerah Kota Batu	Kota	10.00	5.00	4.30	2.57	1.00	4.38	27.20	10.25	35.56	73.01	Baik	
560	Pemerintah Daerah Kota Batu-Batu	Kota	9.99	4.64	0.00	2.64	0.00	4.53	21.91	6.08	35.56	65.15	Cukup	
561	Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Kota	10.00	4.41	4.05	2.56	1.00	4.82	26.84	23.57	40.00	90.41	Sangat Baik	
562	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu	Kota	10.00	5.00	3.75	2.44	1.00	3.39	25.36	19.79	35.56	76.73	Baik	
563	Pemerintah Daerah Kota Bima	Kota	9.48	4.73	3.22	0.00	1.00	4.09	22.50	30.00	40.00	92.30	Sangat Baik	
564	Pemerintah Daerah Kota Binjai	Kota	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	11.00	5.00	35.56	55.56	Cukup	
565	Pemerintah Daerah Kota Bitung	Kota	10.00	3.62	0.00	0.00	0.00	3.28	16.90	9.00	40.00	65.90	Cukup	
566	Pemerintah Daerah Kota Bitur	Kota	10.00	5.00	4.33	3.47	1.00	4.44	24.64	21.93	40.00	90.56	Sangat Baik	
567	Pemerintah Daerah Kota Bogor	Kota	10.00	5.00	4.15	3.69	1.00	4.00	28.84	20.00	40.00	76.84	Baik	
568	Pemerintah Daerah Kota Bontang	Kota	10.00	5.00	3.64	3.12	1.00	3.34	26.80	20.30	40.00	67.10	Baik	
569	Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi	Kota	10.00	5.00	0.00	3.13	0.00	4.78	22.91	20.45	35.56	78.92	Baik	
570	Pemerintah Daerah Kota Cilegon	Kota	10.00	4.22	4.24	0.00	1.00	4.17	23.73	22.00	35.56	61.29	Baik	
571	Pemerintah Daerah Kota Cimahi	Kota	10.00	5.00	3.90	3.20	1.00	4.48	26.87	14.48	40.00	33.34	Baik	
572	Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kota	10.00	0.00	0.00	2.55	1.00	0.00	1.42	18.23	17.84	40.00	76.07	Baik
573	Pemerintah Daerah Kota Depaspar	Kota	10.00	5.00	4.70	3.95	1.00	3.00	29.68	30.00	40.00	99.66	Sangat Baik	
574	Pemerintah Daerah Kota Depok	Kota	10.00	5.00	3.55	0.00	1.00	4.49	23.96	24.75	40.00	68.71	Baik	
575	Pemerintah Daerah Kota Dumai	Kota	10.00	4.99	0.00	3.55	0.00	1.00	14.38	24.38	35.56	54.34	Baik	
576	Pemerintah Daerah Kota Gorontalo	Kota	10.00	5.00	3.25	0.00	1.00	3.47	22.72	10.00	40.00	72.72	Baik	
577	Pemerintah Daerah Kota Gunungrejo	Kota	10.00	4.86	0.00	2.70	0.00	3.66	21.22	9.31	40.00	70.53	Baik	
578	Pemerintah Daerah Kota Jambi	Kota	10.00	5.00	4.05	3.24	1.00	4.55	28.68	18.00	40.00	84.13	Baik	
579	Pemerintah Daerah Kota Jayapura	Kota	10.00	4.73	0.00	2.42	1.00	4.58	25.34	14.50	40.00	77.04	Baik	
580	Pemerintah Daerah Kota Kediri	Kota	9.59	3.89	0.00	0.00	1.00	4.29	19.47	19.47	35.56	76.78	Baik	
581	Pemerintah Daerah Kota Kendari	Kota	10.00	4.80	2.78	0.00	0.00	4.37	21.93	16.57	40.00	60.50	Baik	
582	Pemerintah Daerah Kota Kotabongor	Kota	7.37	4.62	3.09	0.00	0.00	3.75	19.33	30.00	35.56	54.89	Baik	
583	Pemerintah Daerah Kota Krakatau	Kota	11.23	4.97	3.65	0.00	1.00	4.66	21.00	16.16	35.56	73.52	Baik	
584	Pemerintah Daerah Kota Langsa	Kota	10.00	5.00	3.55	0.00	0.00	4.83	23.10	21.00	31.11	75.29	Baik	
585	Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe	Kota	10.00	4.96	5.00	0.00	0.00	4.36	24.32	3.33	35.56	63.21	Cukup	
586	Pemerintah Daerah Kota Lubanglangu	Kota	10.00	5.00	3.67	0.00	0.00	4.43	23.40	11.18	40.00	71.20	Baik	
587	Pemerintah Daerah Kota Majalengka	Kota	10.00	0.00	0.00	3.87	1.00	4.91	24.88	16.88	40.00	41.76	Baik	
588	Pemerintah Daerah Kota Magelang	Kota	10.00	5.00	5.00	3.84	1.00	4.85	29.89	30.00	40.00	89.89	Baik	
589	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Kota	9.43	2.86	0.00	0.00	1.00	4.15	17.44	25.50	35.56	78.50	Baik	
590	Pemerintah Daerah Kota Malang	Kota	10.00	5.00	0.00	2.39	1.00	4.54	23.70	24.60	40.00	84.30	Baik	
591	Pemerintah Daerah Kota Manado	Kota	0.00	4.89	0.00	2.70	0.00	0.00	1.23	9.73	13.04	35.56	58.33	Cukup
592	Pemerintah Daerah Kota Mataram	Kota	10.00	4.73	0.00	0.00	1.00	4.05	19.78	12.00	40.00	71.79	Baik	
593	Pemerintah Daerah Kota Medan	Kota	7.85	4.79	0.00	0.00	0.00	3.99	16.43	20.00	31.11	67.54	Cukup	
594	Pemerintah Daerah Kota Merang	Kota	10.00	4.60	4.71	3.80	1.00	4.40	24.63	14.00	40.00	83.63	Sangat Baik	
595	Pemerintah Daerah Kota Mojokerto	Kota	10.00	5.00	3.00	3.75	1.00	4.71	29.46	15.75	40.00	82.31	Baik	
596	Pemerintah Daerah Kota Padang	Kota	10.00	5.00	3.60	2.96	1.00	4.40	26.96	14.00	40.00	68.88	Baik	
597	Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang	Kota	10.00	5.00	3.19	2.75	0.00	4.96	25.90	30.00	40.00	95.90	Sangat Baik	
598	Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan	Kota	7.50	4.71	3.11	0.00	0.00	4.55	24.55	1.38	1.38	54.11	Cukup	
599	Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam	Kota	10.00	4.70	0.00	0.00	1.00	3.37	19.07	6.22	40.00	47.89	Cukup	
600	Pemerintah Daerah Kota Palang Raya	Kota	10.00	5.00	3.76	3.46	1.00	3.70	26.30	17.14	40.00	63.44	Baik	
601	Pemerintah Daerah Kota Palembang	Kota	10.00	4.50	3.00	1.00	1.00	3.43	22.71	12.44	40.00	75.15	Baik	
602	Pemerintah Daerah Kota Pangajene	Kota	4.89	4.46	3.05	0.00	0.00	1.00	3.39	16.79	43.32	35.56	60.67	Cukup
603	Pemerintah Daerah Kota Palu	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.03	19.03	18.00	40.00	77.03	Baik	
604	Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang	Kota	10.00	5.00	2.95	2.66	1.00	4.57	26.18	16.25	40.00	92.43	Sangat Baik	
605	Pemerintah Daerah Kota Pangarene	Kota	10.00	4.07	0.00	0.00	0.00	5.00	19.07	5.56	40.00	64.63	Cukup	
606	Pemerintah Daerah Kota Panjaitan	Kota	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4.36	14.36	10.81	35.56	60.83	Baik	
607	Pemerintah Daerah Kota Pasuruan	Kota	10.00	5.00	2.54	2.52	1.00	4.00	27.36	15.00	40.00	82.36	Baik	
608	Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh	Kota	10.00	5.00	4.13	3.73	1.00	4.94	28.80	22.84	40.00	91.74	Sangat Baik	
609	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Kota	10.00	5.00	3.74	0.00	1.00	4.89	24.43	20.00	35.56	80.19	Baik	

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kemampuan URPSU	Skor IKRP	Predikat	
610	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Kota	10.00	4.90	0.00	0.00	1.00	3.95	19.85	22.80	35.56	76.21	Baik	
611	Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar	Kota	9.73	4.64	3.84	3.13	1.00	3.31	25.64	18.95	40.00	84.59	Baik	
612	Pemerintah Daerah Kota Pemalang	Kota	10.00	5.00	0.00	3.31	0.00	1.00	5.03	23.32	18.62	40.00	80.94	Baik
613	Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	1.50	17.50	0.00	40.00	54.17	Baik	
614	Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	Kota	10.00	4.94	2.92	3.68	1.00	4.12	26.64	21.72	40.00	88.58	Baik	
615	Pemerintah Daerah Kota Sabang	Kota	10.00	5.00	3.21	0.00	0.00	4.17	22.38	14.12	40.00	76.50	Baik	
616	Pemerintah Daerah Kota Salajiga	Kota	10.00	4.90	0.00	0.00	1.00	4.65	20.55	15.00	40.00	75.55	Baik	
617	Pemerintah Daerah Kota Samudra	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.96	19.96	20.00	40.00	78.96	Baik	
618	Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	Kota	10.00	3.99	3.59	2.64	0.00	4.24	24.46	20.77	40.00	65.23	Baik	
619	Pemerintah Daerah Kota Semarang	Kota	10.00	5.00	4.23	0.00	1.00	4.56	24.79	24.71	40.00	89.50	Baik	
620	Pemerintah Daerah Kota Serang	Kota	10.00	4.67	5.00	2.12	0.00	4.69	27.12	23.48	31.11	81.71	Baik	
621	Pemerintah Daerah Kota Singaraja	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	19.00	19.00	40.00	64.00	Kurang	
622	Pemerintah Daerah Kota Singkawang	Kota	10.00	5.00	3.18	1.00	1.00	4.99	29.17	17.37	40.00	96.54	Baik	
623	Pemerintah Daerah Kota Solok	Kota	10.00	5.00	4.02	3.11	1.00	3.26	26.41	19.00	40.00	85.50	Baik	
624	Pemerintah Daerah Kota Sorong	Kota	3.18	5.00	4.95	0.00	0.00	3.42	18.55	6.43	35.56	60.54	Cukup	
625	Pemerintah Daerah Kota Sukoharjo	Kota	9.01	5.00	4.43	0.00	1.00	4.48	23.92	2.50	40.00	66.42	Cukup	
626	Pemerintah Daerah Kota Sukoharjo	Kota	10.00	3.77	0.00	3.04	1.00	4.99	22.79	10.50	40.00	73.29	Baik	
627	Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh	Kota	9.57	4.93	5.00	0.00	1.00	5.00	25.50	8.18	17.78	51.46	Cukup	
628	Pemerintah Daerah Kota Surabaya	Kota	10.00	5.00	5.00	3.40	1.00	4.87	26.47	16.61	40.00	95.06	Baik	
629	Pemerintah Daerah Kota Surakarta	Kota	10.00	5.00	2.35	3.53	1.00	4.58	26.99	18.65	40.00	85.64	Baik	
630	Pemerintah Daerah Kota Tangerang	Kota	10.00	5.00	4.62	3.99	1.00	4.97	29.55	19.55	40.00	96.14	Sangat Baik	
631	Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	Kota	10.00	5.00	3.19	2.11	1.00	4.53	25.93	14.00	40.00	79.93	Baik	
632	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai	Kota	10.00	5.00	3.24	0.00	0.00	4.20	23.44	19.28	35.56	77.28	Baik	
633	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	Kota	9.97	5.00	3.24	2.02	1.00	4.70	25.93	15.00	40.00	80.93	Baik	
634	Pemerintah Daerah Kota Tarakan	Kota	10.00	5.00	3.75	3.02	1.00	4.04	26.81	27.00	40.00	93.81	Sangat Baik	
635	Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya	Kota	9.31	5.00	2.73	0.00	1.00	4.95	23.47	7.74	40.00	71.21	Baik	
636	Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi	Kota	10.00	5.00	4.15	3.48	1.00	4.95	26.56	9.47	40.00	78.03	Baik	

Lampiran 9. Surat Hasil Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025



Nomor : T/AK.01.00/100/2026

Jakarta, 6 Januari 2026

Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu Dokumen

Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik

di

Jakarta

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga mengukur pengelolaan arsip elektronik yang diwujudkan dalam tingkat digitalisasi arsip sebagai salah satu indikator pada evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 pada Badan Pusat Statistik adalah sebesar **96,61 (sembilan puluh enam koma enam satu)** atau kategori "**AA (Sangat Memuaskan)**" dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025
Badan Pusat Statistik

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2025	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	96,73	60%	58,04
Internal	96,42	40%	38,57
Nilai Akumulasi			96,61

Pada masa transisi implementasi Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, maka nilai hasil pengawasan kearsipan internal menggunakan nilai rata-rata unit pengolahan yang diambil secara sampling.

Adapun nilai tingkat digitalisasi arsip pada Badan Pusat Statistik sebesar **96,82 (sembilan puluh enam koma delapan dua)** dengan kategori "**AA (Sangat Memuaskan)**".

Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan eksternal di Badan Pusat Statistik, bersama ini kami sampaikan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Kami sangat mengapresiasi upaya Ibu beserta seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Atas perhatian Ibu Kepala Badan Pusat Statistik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Mego Pinandito

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 10. Diseminasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Biro Umum Tahun 2025

BADAN PUSAT STATISTIK
BIRO UMUM

MEMORANDUM
NOMOR 1/02500/VS.600/2026

Yth. : Seluruh Pegawai di Lingkungan Biro Umum
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Layanan Biro Umum Tahun 2025

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Biro Umum secara berkelanjutan, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Layanan Biro Umum kepada seluruh pegawai BPS Pusat pada tanggal 22 Desember 2025 s.d. 12 Januari 2026.

Berdasarkan hasil survei sebagaimana tercantum dalam lampiran, secara umum tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum berada pada kategori baik, dengan beberapa aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait kecepatan layanan, kualitas output, dan kesesuaian layanan pada beberapa jenis layanan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil survei ini disampaikan sebagai bahan evaluasi bersama dan dasar pelaksanaan langkah-langkah perbaikan layanan secara terukur dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Biro Umum ke depan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Januari 2026
Kepala Biro Umum,



Martin Wibisono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Memorandum
Nomor : 1/02500/VS.600/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

HASIL SURVEI KEPUASAN LAYANAN BIRO UMUM TAHUN 2025

Tabel 1. Hasil Pencacahan Survei Kepuasan Layanan Biro Umum Menurut Jumlah Responden dan Persentasenya Tahun 2025

Hasil Pencacahan	Jumlah Responden	Persentase
Berhasil Dicacah	845	46,61
Tidak Berhasil Dicacah	968	53,39
Jumlah	1.813	100,00

Tabel 2. Tingkat Kepuasan, Jumlah Indikator, dan Jumlah Pengguna Layanan Menurut Jenis Layanan di Biro Umum Tahun 2025

Jenis Layanan	Jumlah Indikator	Indeks/Tingkat Kepuasan	Jumlah Pengguna Layanan
Layanan Permintaan pemilihan penyedia	9	86,39	28
Layanan Konsultasi Pengadaan dan Pendampingan	7	90,56	18
Layanan Permintaan ATK dan Computer Supply (Toner)	5	86,36	276
Layanan Permohonan Penghunian Rumah Negara	5	82,15	27
Layanan Pencetakan dan Pengiriman	6	91,71	163
Layanan Kearsipan	6	87,34	74
Layanan Pelaporan Kerusakan, Kebersihan, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	5	88,20	232
Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas	5	90,90	146
Layanan Biro Umum	48	87,95	964

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum Menurut Indikator Tahun 2025

Indikator	Tingkat Kepuasan
Layanan Permintaan pemilihan penyedia	
IIA.a.3. Kemudahan Sarana permintaan pemilihan penyedia barang/jasa baik yang melalui Pokja Pemilihan maupun Pejabat Pengadaan	87,14
IIA.a.4. Ketersediaan informasi alur/prosedur layanan permintaan pemilihan penyedia barang/jasa baik yang melalui Pokja Pemilihan maupun Pejabat Pengadaan	84,64
IIA.a.5. Kejelasan terkait alur/prosedur serta dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan permintaan pemilihan penyedia barang/jasa baik yang melalui Pokja Pemilihan maupun Pejabat Pengadaan	83,21
IIA.a.6. Petugas layanan (Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan) komunikatif dan tanggap dalam meresponse kebutuhan/permintaan	86,43
IIA.a.7. Petugas layanan (Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan) dapat memberikan revidi dan masukan terhadap kelengkapan dokumen pengadaan dengan baik	85,00
IIA.a.8. Tidak ada imbalan yang diminta baik oleh UKPBJ termasuk oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan diluar ketentuan yang bersifat pribadi	89,29
IIA.a.9. Kecepatan dalam meresponse permintaan pemilihan penyedia barang/jasa baik yang melalui pokja pemilihan/pejabat Pengadaan	87,14
IIA.a.10. Kualitas calon penyedia hasil pemilihan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	87,50
IIA.a.11. Kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	87,14
Layanan Konsultasi Pengadaan dan Pendampingan	
IIA.b.2. Kemudahan sarana untuk mengajukan permintaan konsultasi/pendampingan pengadaan barang/jasa	89,44
IIA.b.3. Petugas layanan komunikatif dan meresponse dengan baik atas permintaan konsultasi/pendampingan Pengadaan barang/jasa yang diajukan	89,44
IIA.b.4. Petugas layanan mampu memberikan rekomendasi/pendampingan dengan baik sesuai dengan permasalahan yang diajukan	90,00
IIA.b.5. Tidak ada imbalan yang diminta oleh UKPBJ termasuk petugas layanan atas pemberian konsultasi/pendampingan Pengadaan barang/jasa diluar ketentuan yang bersifat pribadi	93,89
IIA.b.6. Tidak ada diskriminasi dalam memberikan layanan konsultasi/pendampingan pengadaan barang/jasa	92,78
IIA.b.7. Kecepatan dalam meresponse permintaan konsultasi/pendampingan pengadaan barang/jasa yang diajukan	90,00
IIA.b.8. Rekomendasi atas permintaan konsultasi/pendampingan	88,33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	Tingkat Kepuasan
pengadaan barang/jasa diterima dengan jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan permasalahan yang diajukan	
Layanan Permintaan ATK dan Computer Supply (Toner)	
IIB.a.1. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	86,85
IIB.a.2. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan	86,78
IIB.a.3. Petugas pelayanan merespon dengan baik.	86,38
IIB.a.4. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	85,91
IIB.a.5. Tidak ada pungli/penerimaan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	85,91
Layanan Permohonan Penghunian Rumah Negara	
IIB.b.2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	87,78
IIB.b.3. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan	82,59
IIB.b.4. Petugas pelayanan mampu memberikan informasi yang jelas.	78,15
IIB.b.5. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	72,22
IIB.b.6. Tidak ada pungli/penerimaan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	90,00
Layanan Pencetakan dan Pengiriman	
IIC.a.2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	91,23
IIC.a.3. Petugas pelayanan merespon dengan baik.	91,35
IIC.a.4. Petugas pelayanan mampu memberikan informasi yang jelas dan sesuai	90,98
IIC.a.5. Jangka waktu penyelesaian pelayanan	90,31
IIC.a.6. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	91,96
IIC.a.7. Tidak ada pungli/penerimaan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	94,42
Layanan Kearsipan	
IIC.b.2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen	86,76
IIC.b.3. Petugas pelayanan merespon dengan baik.	87,30
IIC.b.4. Petugas pelayanan mampu memberikan informasi yang jelas dan sesuai	86,49
IIC.b.5. Jangka waktu penyelesaian pelayanan	85,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	Tingkat Kepuasan
IIC.b.6. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	87,97
IIC.b.7. Tidak ada pungli/penerimaan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	90,54
Layanan Pelaporan Kerusakan, Kebersihan, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	
IID.a.2. Alur dan syarat layanan mudah di pahami	86,34
IID.a.3. Kecepatan response layanan (pemeriksaan dan perbaikan)	87,16
IID.a.4. Pelaksana layanan memiliki attitude, penampilan dan hasil kerja yg baik, serta mampu memberikan informasi yg dikerjakan	88,41
IID.a.5. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	92,59
IID.a.6. Tidak ada pungli/penerimaan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	90,34
Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas	
IID.b.2. Alur dan syarat layanan mudah di pahami	90,41
IID.b.3. Kecepatan response layanan (pemeriksaan dan perbaikan)	90,34
IID.b.4. Pelaksana layanan memiliki attitude, penampilan dan hasil kerja yg baik, serta mampu memberikan informasi yg dikerjakan	90,62
IID.b.5. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	90,62
IID.b.6. Tidak ada pungli/penerimaan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	92,53

Tabel 4. Jumlah Pengguna Layanan Berdasarkan Kategori Pelayanan yang Harus Ditingkatkan Menurut Jenis Layanan di Biro Umum Tahun 2025

Jenis Layanan	Jumlah Pengguna Layanan Berdasarkan Kategori Pelayanan yang Harus Ditingkatkan		
	Kecepatan Layanan	Kualitas Output Layanan	Kesesuaian Layanan
Layanan Permintaan pemilihan penyedia	13	2	5
Layanan Konsultasi Pengadaan dan Pendampingan	6	5	3
Layanan Permintaan ATK dan Computer Supply (Toner)	70	72	57
Layanan Permohonan Penghunian Rumah Negara	7	7	5
Layanan Pencetakan dan Pengiriman	39	45	13
Layanan Kearsipan	22	18	10
Layanan Pelaporan Kerusakan,	88	44	21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenis Layanan	Jumlah Pengguna Layanan Berdasarkan Kategori Pelayanan yang Harus Ditingkatkan		
	Kecepatan Layanan	Kualitas Output Layanan	Kesesuaian Layanan
Kebersihan, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor			
Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas	42	21	12

Tabel 5. Jumlah Pengguna Layanan Berdasarkan Fasilitas yang Digunakan Untuk Memperoleh Layanan Menurut Jenis Layanan di Biro Umum Tahun 2025

Jenis Layanan	Jumlah Pengguna Layanan Berdasarkan Fasilitas yang Digunakan Untuk Memperoleh Layanan					
	Datang Langsung ke Ruang	Telepon Kantor	Chat/ Whatsapp	Email / Srikandi	Registrasi melalui Link (https://s.bps.go.id/UsulanHuniRumahNegara)	Link Peminjaman Kendaraan
Layanan Permintaan pemilihan penyedia	19	3	16	2		
Layanan Konsultasi Pengadaan dan Pendampingan	10	1	14	2		
Layanan Permintaan ATK dan Computer Supply (Toner)						
Layanan Permohonan Penghunian Rumah Negara	8			2	23	
Layanan Pencetakan dan Pengiriman	93	23	95	84		
Layanan Kearsipan	45	15	45	36		
Layanan Pelaporan Kerusakan, Kebersihan, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	105	66	156	46		
Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas	67	25	101	27		55

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 11. Daftar Prestasi/Penghargaan yang Diraih Biro Umum Tahun 2025

No	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Kategori	Tanggal Pemberian Penghargaan
1	Piagam Penghargaan	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	29 Oktober 2025
2	Piagam Penghargaan	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang Memperoleh Peringkat VII dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024.	14 Mei 2025
3	Plakat	Kementerian Perindustrian	Juara 1 Kategori Lembaga Negara dan Kementerian/ Lembaga dengan Anggaran Belanja Menengah atas Capaian Belanja Produk Dalam Negeri di Tahun Anggaran 2024 – Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	15 Desember 2025
4	Plakat	Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 sebagai Juara II Kategori Penjual Lelang Noneksekusi Wajib Terbaik untuk kementerian/lembaga di atas 100 satuan kerja	18 Desember 2025
5	Plakat	Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 sebagai Juara III Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Kelompok untuk kementerian/lembaga di atas 100 satuan kerja	18 Desember 2025

Lampiran 12. Daftar Inovasi yang Dihasilkan Biro Umum Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Keterangan Inovasi	Cakupan
1	Aplikasi Chatbot si CERMAT (CEpat, Responsif, dan Maksimal Tindak Lanjut)	Aplikasi untuk pengaduan terkait masalah kerusakan dan kebersihan, yang hadir sebagai solusi berbasis teknologi melalui pemanfaatan QR Code dan chatbot WhatsApp	Satker Sekretariat Utama BPS
2	Sistem Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Terpadu (SIMANDARU) pada BackOffice	Sistem yang memudahkan seluruh Satker BPS untuk memantau progres pemanfaatan sistem Pengadaan (mencakup pengumuman RUP, Penyelesaian E-Purchasing, E-Tendering, E-Kontrak, dan Pencatatan Non Tender/Non E-Purchasing Non E-Tendering) dengan data yang <i>up to date</i> secara harian dan secara mandiri, dalam rangka memperoleh nilai indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang optimal dalam rangka penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).	Seluruh Satker BPS se-Indonesia

Lampiran 13. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Uraian	Belanja				Capaian Kinerja		
	Anggaran (Total) Rp	Anggaran (Dapat Digunakan) Rp	Realisasi Rp	% Realisasi Terhadap Anggaran (Dapat Digunakan)	Target	Realisasi	%
Sasaran Kegiatan	138.015.864.000	129.655.907.000	119.404.930.629	92,09			100,68
IKSK					3,66	3,68	100,55
IKSK					89,60	90,07	100,52
IKSK					95,00	96,61	101,69
IKSK					88,00	87,95	99,94
RO	137.300.000	137.300.000	105.026.639	76,49	1,00	1,00	
RO	1.941.410.000	1.941.410.000	1.742.221.562	89,74	3,00	3,00	
RO	132.357.444.000	124.758.195.000	115.008.225.725	92,18	1,00	1,00	
RO	2.842.613.000	2.081.905.000	2.057.427.358	98,82	1,00	1,00	
RO	737.097.000	737.097.000	492.029.345	66,75	1,00	1,00	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK